

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN BERKELANJUTAN  
INSEMINASI BUATAN DAN GANGGUAN REPRODUKSI SAPI PADA  
DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PINRANG**



**A.NURFADILAH MAKMUR**

Nomor Induk Mahasiswa: 10561 1126 416

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**

**MAKASSAR**

**2021**

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN BERKELANJUTAN  
INSEMINASI BUATAN DAN GANGGUAN REPRODUKSI SAPI PADA  
DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PINRANG**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh:

A. Nurfadilah Makmur

Nomor Induk Mahasiswa: 10561 11264 16

Kepada

06/07/2021

-  
1 EXP  
Smb. Alumni

-  
R/0097/ADN/ZICD  
MAK  
1

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2021**

## HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Proposal Penelitian : Implementasi Program Pelayanan Berkelanjutan  
Inseminasi Buatan dan Gangguan Reproduksi  
Sapi Pada Dinas Peternakan Dan Perkebunan  
Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : A. Nurfadilah Makmur

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 1126 416

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

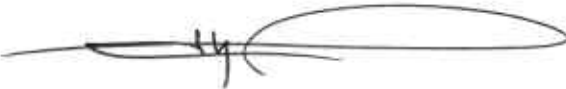
  
Dr. Drs. M. Anwar Parawangi, M.Si

  
Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si

Mengetahui:

  
Dekan  
  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si  
NBM: 730727

Ketua Program Studi

  
Nasrul Haq, S.Sos., MPA  
NBM: 1067463

## HALAMAN PENERIMAAN TIM


Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0134/FSP/A.4-11/XI/42/2020 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Sabtu tanggal 08 bulan Mei tahun 2021

### TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si**  
NBM: 730727


  
**Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si**  
NBM: 1084366

### PENGUJI:

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

(  )

2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

(  )

3. Nasrul Haq, S.Sos., MPA

(  )

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : A. Nurfadilah Makmur

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 1126 416

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar proposal penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 27 Februari 2021

Yang Menyatakan,

A. Nurfadilah Makmur



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah, Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi Pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang”.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Drs. H. Anwar Parawangi, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Mama tercinta Andi Nurdiana, Ibu Andi Farida, serta segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril dan materil.
5. Sahabat-sahabat terkasih saya Aci Elsan, Vitrah Ramadhani, Nurfadillah

Arifuddin, S.H, Hadija Nur, S.Ip, Atikah Dinda yang selalu memberi semangat dan bantuan.

6. Teman seperjuangan saya Andi Mega Puspitasari, rekan-rekan tercinta dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Kelas G angkatan 2016 untuk segala cerita, kenangan, dan kebersamaannya serta semua pihak yang selalu memberikan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 27 Februari 2021

A. Nurfadilah Makmur

## ABSTRAK

### **A. Nurfadilah Makmur, Anwar Parawangi, Samsir Rahim. Implementasi Program Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan Dan Gangguan Reproduksi Sapi Pada Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupatenn Pinrang.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi Pada Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikaji dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek (1) Komunikasi dengan terbentuknya tim pelayanan inseminasi yang senantiasa saling berkoordinasi dalam menentukan strategi pelaksanaan program. (2) sumber daya dalam pelaksanaan inseminasi buatan pelayanan terdiri dari tenaga ahli yang berkompeten dalam inseminasi (3) disposisi merupakan sikap dari pelaksana pelayanan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi yang benar-benar berkomitmen dalam menjalankan kegiatan inseminasi dengan senantiasa melakukan musyawarah dalam melaksanakan kegiatan. (4) struktur birokrasi terlihat dari pembagian kerja dari setiap tim pelayanan inseminasi sehingga pelaksanaan pelayanan terlaksana secara bertahap.

**Kata Kunci:** Implementasi kebijakan, inseminasi buatan, dan peternakan



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR HASIL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teori.....	10
1. Konsep Implementasi.....	10
2. Model Impelementasi.....	18
3. Kebijakan Peternakan Sapi.....	23
C. Kerangka Pikir.....	31
D. Fokus Penelitian.....	33
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	33
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN.....	35
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	35
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	35
C. Informan.....	36

D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Teknik Analisis Data.....	38
F. Keabsahan Data.....	39
BAB IV.....	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	41
1. Sejarah Kabupaten Pinrang.....	41
2. Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang.....	47
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	54
1. Komunikasi.....	55
2. Sumber Daya.....	59
3. Disposisi.....	65
4. Struktur Birokrasi.....	69
BAB V.....	72
PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	77

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	36
Tabel 4. 1 Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Pinrang.....	45
Tabel 4. 2 Keberhasilan Program Pelan Itu Bagus dalam meningkatkan Populasi Sapi ..	75



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Implementasi Edward III .....	20
Gambar 2.2 Gambar Model Implementasi Grindle.....	21
Gambar 2.3 Bagan Model Implementasi Soren Winter.....	23
Gambar 2.4 Kerangka Konseptual .....	32
Gambar 5. 1.....	77
Gambar 5. 2.....	78
Gambar 5. 3.....	79
Gambar 5. 4.....	80
Gambar 5. 5.....	81
Gambar 5. 6.....	81





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sapi merupakan ternak yang umum dipelihara dan beternak sapi merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat pedesaan. Sapi biasanya dipelihara untuk diambil tenaga, daging, dan susunya. Di Indonesia terdapat beberapa sapi lokal yang memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap pakan yang berkualitas rendah, sistem pemeliharaan ekstensif dan memiliki daya tahan terhadap penyakit ektoparasit. Bangsa sapi yang ada di Indonesia diantaranya adalah Sapi Bali, Sapi Pesisir, Sapi Madura dan Sapi Aceh.

Pada umumnya peternakan di Pinrang masih tradisional. Hewan ternak dilepas begitu saja, dan peternakan sapi sebagai usaha sambilan (*second income*). Dalam kondisi tersebut, sapi betina induk hanya mampu beranak 2-3 ekor dalam 5 tahun. Pinrang termasuk wilayah sentra pengembangan sapi di Provinsi Sulawesi Selatan. Meski demikian perkembangan populasi ternak sapi di daerah ini masih dirasakan belum maksimal, sementara letak geografis dan sumberdaya alam Kabupaten Pinrang berpotensi dalam pengembangan usaha ternak sapi (Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kab. Pinrang).

Faktor lain yang menyebabkan terhambatnya peningkatan populasi adalah adanya penyakit gangguan reproduksi. Penyakit ini dapat mengakibatkan rendahnya kemampuan reproduksi untuk menghasilkan anak. Kurang terkontrolnya sistem perkawinan alam, penyebab utama dari

penyakit ini. Sapi yang dipelihara dengan sistem dilepas berpeluang besar terhadap penularan penyakit gangguan reproduksi.

Melalui Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang di tahun 2015 membangun inovasi yang dinamakan Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi (Pelan Itu Bagus). Hal ini cukup unik, karena pelayanan dilakukan 21 hari berturut-turut dalam satu kelompok ternak. Hal itu disesuaikan dengan 21 hari siklus birahi sapi, sebagai syarat utama dalam keberhasilan pelaksanaan inseminasi buatan. pelayanan 21 hari secara terus menerus, maka sapi induk yang tidak bunting secara keseluruhan dapat terinseminasi. Begitu pula dengan sapi induk yang terindikasi mengalami gangguan reproduksi dapat disembuhkan dengan pengobatan yang intensif, untuk selanjutnya dilakukan inseminasi setelah injeksi hormon perangsang birahi.

Pelayanan berkelanjutan dilakukan oleh petugas teknis peternakan yang tergabung dalam satu tim, terdiri dari dokter hewan, asisten teknis reproduksi, pemeriksa kebuntingan, inseminator, dan petugas peternakan kesehatan hewan kecamatan. Tim Pelayanan bertugas memeriksa kebuntingan, pengelompokan sapi induk berdasar kepada induk bunting, tidak bunting, beranak dibawah dua bulan, dan sapi induk yang terindikasi mengalami gangguan reproduksi.

Berdasarkan data awal yang dihimpun penulis dari Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang setelah pelaksanaan program pelan itu bagus melalui inseminasi buatan maka terjadi peningkatan yang di

paparan sebagai berikut berikut: tahun 2017 (6.245 ekor), tahun 2018 (7.768 ekor), tahun 2019 (9.823 ekor)

Inseminasi buatan adalah proses perkawinan berdasarkan campuran tangan manusia. Inseminasi buatan dilakukan dengan mempertemukan sel sperma dan sel telur agar dapat terjadi pembuahan. Teknologi inseminasi buatan dimaksud agar dapat di peroleh hasil secara efektif dan efisien dalam penggunaan pejantan terpilih, menghindari terjadinya penyebaran penyakit melalui sarana reproduksi, dan mengatasi bila terjadi kendala dalam perkawinan antara si jantan dan betina.

Sebagai bangsa yang masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai petani dan variannya seperti peternak, maka keberadaan hewan ternak merupakan potensi ekonomi masyarakat yang terus dipacu perkembangannya, sehingga berbagai program swasembada pangan menjadi prioritas pembangunan di daerah-daerah yang memiliki potensi peternakan hewan, yang tentunya berbasis pada masyarakat yang menjadi tulang punggung pembangunan daerah.

Hewan ternak yang menjadi salah satu sumber kehidupan masyarakat di Daerah akan berdampak baik dan positif apabila dalam pelaksanaannya dikelola secara teratur dan tertib. Akan tetapi menimbulkan persoalan kemasyarakatan ketika hewan ternak mengalami kesehatan reproduksi sehingga dapat berpengaruh dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Idealnya dalam usaha untuk mencapai tujuan pengembangan sapi potong dapat dilaksanakan dengan tiga pendekatan yaitu (Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang 2020) ;

1. Pendekatan teknis dengan meningkatkan kelahiran, menurunkan kematian, mengontrol pemotongan ternak dan perbaikan genetik ternak
2. Pendekatan terpadu yang menerapkan teknologi produksi, manajemen ekonomi, pertimbangan sosial budaya yang tercakup dalam “sapta usaha peternakan,serta pembentukan kelompok peternak yang bekerjasama dengan instansi terkait.
3. Pendekatan agribisnis dengan tujuan mempercepat pengembangan peternakan melalui integrasi dari keempat aspek yaitu lahan, pakan, plasma nutfah dan sumberdaya manusia.

Menjawab persoalan tersebut adalah dengan melakukan Inseminasi Buatan (IB). Inseminasi buatan (IB) berbeda dengan kawin alam, dalam pengertian bahwa ejakulasi semen tidak didepositkan dalam vagina betina, tetapi dalam vagina buatan. Semen diproses dan dikemas serta pada akhirnya dimasukkan ke sejumlah betina.

Pemerintah Kabupaten Pinrang mengapresiasi ide inovasi ini dan selanjutnya dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan dan telah direplikasi di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang. Pemerintah menyadari bahwa pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat



di Kabupaten Pinrang. Wujud dari keseriusan Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam bidang pembangunan, yaitu dengan menciptakan program pemberdayaan masyarakat.

Salah satunya dengan program inovasi pelayanan berkelanjutan, yakni inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi di Kabupaten Pinrang merujuk dari beberapa dasar hukum yaitu Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Nomor 021 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi (Pelan Itu Bagus) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Betina Bunting serta Keputusan Menteri Pertanian Nomor 656/Kpts/OT.050/10/2016 tentang Kelompok Kerja Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting.

Kegunaan atau manfaat dari program pemberdayaan ini lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan daging yang ada di Kabupaten Pinrang serta mempermudah para peternak sapi untuk mewujudkan tujuan dari Program Pelan Itu Bagus (Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan

dan Gangguan Reproduksi Sapi) yang notabene sangat membantu perekonomian warga di Kabupaten Pinrang dalam hal ini para peternak sapi (Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang 2020).

Inseminasi buatan atau kawin suntik pada budidaya sapi perah dan potong sudah dikenal di Indonesia sejak 1976. Meski demikian, teknik memasukkan semen beku yang telah dicairkan untuk meningkatkan reproduksi ini berkontribusi menyebabkan timbulnya gangguan kesuburan pada sapi.

Munculnya gangguan reproduksi pada sapi ini, disebabkan oleh pelaksanaan inseminasi buatan yang kurang sesuai dengan aturan. Sehingga menyebabkan kasus *anestrus* (tidak birahi), *repeat breeding* (kawin berulang), dan *nimfomania* (birahi terus menerus) pada sapi di kemudian hari.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan program pelan itu bagus adalah kurangnya tenaga ahli yang memahami inseminasi buatan. Kesalahan inseminasi di lapangan dikarenakan pelaksananya kebanyakan bukan dari kalangan praktisi dokter hewan. Karena jumlah dokter hewan yang masih sangat terbatas. Disamping itu, pelaksanaan inseminasi di lapangan juga tidak didukung dengan prasarana yang menunjang, seperti kondisi sanitasi yang kurang baik.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam dengan mengangkat judul Implementasi

Program Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Implementasi Program Pelan Itu Bagus dalam meningkatkan produksi peternakan sapi di Kabupaten Pinrang?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi program Pelan Itu Bagus dalam meningkatkan produksi peternakan sapi di Kabupaten Pinrang.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis
  - a. Dapat dijadikan referensi untuk pembahasan yang berkaitan dengan pengembangan khususnya ilmu administrasi Negara tentang peternakan sapi.
  - b. Memberikan masukan terhadap kemajuan program inovasi dalam aspek administarasi pelayanan pemerintahan.
2. Secara Praktis
  - a. Dapat di jadikan input bagi pengambil keputusan dan kebijakan untuk meningkatkan pengembangan peternakan sapi dalam kecamatan administrasi pelayanan pemerintah

- b. Dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti lain untuk melihat kemajuan pengembangan peternakan di daerah lain





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dwi Priyanto (2011) dalam Strategi Pengembangan Usaha Ternak Sapi Potong Dalam Mendukung Program Swasembada Daging Sapi Dan Kerbau Tahun 2014. Laju permintaan daging sapi meningkat tajam seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Namun, sampai saat ini Indonesia masih merupakan negara net importir daging sapi karena 35% pasokan dipenuhi dari impor. Upaya mencapai swasembada daging sapi dan kerbau (PSDSK) tahun 2014 di fokuskan pada pengembangan usaha peternakan rakyat dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Strategi untuk mendukung PSDSK meliputi pengembangan sentra produksi sapi potong dan penggalian sumber pakan serta pengembangan aspek teknis dan teknologi meliputi penyelamatan sapi betina produktif untuk meningkatkan populasi ternak, menunda pemotongan ternak untuk mencapai bobot potong yang optimal, memperpendek jarak beranak dan penerapan teknologi inseminasi buatan (IB). Kebijakan pemerintah dengan mengendalikan impor daging dan sapi bakalan berperan penting pula dalam melindungi peternakan rakyat.

Hajar Ashwad (2017) Implementasi Program Ternak Penggemukan Sapi Bali di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus Tentang Program Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Swasembada Daging Di Kawasan Ternak Ketapang Kabupaten Aceh Tengah) Dari hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan untuk mencapai

swasembada daging terindikasi gagal tidak sesuaiya finansial anggaran yang digelontorkan dengan hasil yang dicapai, kegagalan ini disebabkan beberapa lokasi kawasan peternakan juga kurang mendukung dijadikan sebagai zona lokasi ternak sapi yang mana keadaan tanah gersang dan kurangnya sumber air meskipun sudah dilakukan kelayakan studi lapangan, namun realita di lapangan berbeda sehingga terkesan program ini terlalu dipaksakan jika ditinjau dari sisi politis. Kondisi kawasan peternakan ketapang saat ini sebagian besar dari para peternak lebih memilih hengkang dan meninggalkan lokasi peternakan sehingga beberapa fasilitas penunjang terbengkalai tidak terfungsikan dengan baik.

Muhammad Amar Musdar (2017) yang berjudul Strategi Pengembangan Sapi Potong di Desa Pangalloong Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba. Penelitian ini menghasilkan beberapa strategi diantaranya yaitu: Mengoptimalkan dan mengembangkan kemampuan internal peternak serta memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia, Memberikan program pendampingan dan penyuluhan disertai dengan demonstrasi sehingga dapat meningkatkan kemampuan peternak, Menjalin usaha kemitraan bersama pemerintah guna memanfaatkan peluang pasar, Pengenalan teknologi pengolahan pakan berbasis limbah pertanian yang disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat dan Bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat guna mengefektifkan usaha ternak serta Penyediaan sarana prasarana penunjang usaha ternak.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian penulis terkait Implementasi Program Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang lebih kepada pendekatan yang di gunakan dalam meningkatkan produksi hasil peternakan sapi, dimana penelitian ini lebih mengarah kepada pelaksanaan pembuatan inseminasi buatan agar menambah jumlah produksi sapi, sementara dari penelitian sebelumnya hanya mengarah kepada kebijakan pemerintah dalam mengatur keuntungan produksi bagi peternak melalui pemasaran.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Konsep Implementasi**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Anggara (2014) Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut Mulyadi (2015:12) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.



Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu Majid dan Rochman (2014). Sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan.

Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam Taufik dan Israil (2013:136) mendefinisikan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan dalam keputusan sebelumnya, tindakan ini mencakup usaha-usaha dalam mengubah suatu keputusan menjadi sebuah tindakan-tindakan pada jangka waktu tertentu, serta dalam rangka melanjutkan aktivitas dalam mencapai perubahan besar maupun kecil yang sudah ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang dilakukan oleh suatu organisasi publik yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Sedangkan Horn dalam Tahir (2014:55), mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.

Selanjutnya Kapioru (2014:105) menyebutkan, ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- a. Kondisi lingkungan (*environmental conditions*),



- b. Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*).
- c. Sumberdaya (*resources*).
- d. Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*).

Implementasi dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat) melengakapi dan menyelesaikan. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu Widodo (2011).

Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Menurut Dunn (2003:132) implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor- faktor tersebut diantaranya Subarsono (2011:101):

- a. Kondisi lingkungan

Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima program.

- b. Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

c. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program

Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non human resources*).

d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Harsono (2002:67) implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan

dan berhasil menghasilkan output dan outcomes seperti direncanakan. Sulistyastuti (2012:21) menyebutkan implelementasi kebijakan sebagai sebuah proses , serangkaian keputusan dan tindakan penting yang diarahkan dalam penetapan keputusan oleh pemerintah yang memiliki dampak dari keputusan tersebut.

Sedangkan pengertian secara umum dengan nilai-nilai yang ada dalam kebijakan publik yang di utarakan oleh Purwanto dan Sulistyastuti (2012:64) adalah sebagai berikut:

- a. Alat untuk mewujudkan nilai-nilai didealkan masyarakat seperti keadilan, persamaan dan keterbukaan
- b. Memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat misalnya masalah kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan pelayanan publik yang buruk
- c. Memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat seperti dorongan investasi, inovasi, pelayanan dan peningkatan ekspor
- d. Melindungi masyarakat dari praktis swasta yang merugikan misalnya pembuatan undang-undang konsumen, izin trayek dan izin gangguan.

Wahab (2002:3) menyebutkan implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluran kebijakan (*to deliver Policy output*) yang dilakukan oleh implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan



diharapkan akan muncul manakala *policy* output dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu terwujud.

Perlu dipahami bahwa implementasi suatu kebijakan atau program tidak dilakukan dalam ruang hampa. Implementasi terjadi dalam suatu wilayah yang didalamnya terdapat berbagai faktor seperti : kondisi geografis, sosial, ekonomi dan politik yang memiliki kontribusi penting dalam kegiatan implementasi. Dalam proses implementasi publik yang melibatkan publik akan terjadi interaksi aktor-aktor, baik dari kalangan pemerintah maupun non-pemerintah yang menimbulkan adanya dinamika politik yang menyertai proses implementasi itu sendiri.

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yaitu Taufik dan Isril (2013:136) :

- a. Tahapan pengesahan peraturan perundangan
- b. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana
- c. Kesiediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan
- d. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak
- e. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
- f. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Lingkungan kebijakan yang kondusif tentu akan menciptakan kondisi yang memungkinkan implementasi untuk dapat berhasil. Sebaliknya



lingkungan kebijakan yang buruk justru akan membuat implementasi kebijakan menjadi terhambat atau gagal sama sekali. Dengan demikian faktor lingkungan memberikan pengaruh pada proses implementasi.

Winarno (2008), yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya.

Meter dan Horn dalam Winarno (2008) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Menurut Anderson dalam Situmeang (2012), faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu:

- a. Adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu
- b. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau

pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hokum dan keinginan pemerintah

- c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencendrungkan orang bertidak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum
- d. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan ukuran kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik
- e. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan system nilai yang dimuat masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif Ramdhani (2017).

Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik perubahan pengetahuan, ketrampilan, maupun nilai dan sikap. Dengan demikian implementasi adalah suatu kegiatan penerapan ide maupun gagasan dalam bentuk tindakan ataupun kegiatan, sehingga memberikan

perubahan baik, dari segi afektif, kognitif dan psikomotorik bagi pelaksana kegiatan tersebut Akib (2016).

Implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sehingga bila dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ditetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan Rahmawati (2012).

Sebagai kesimpulan penulis pemaparan proses dari implementasi kebijakan maka untuk memahami lebih jauh implementasi kebijakan perlu dilihat lebih detail dengan mengikuti proses implementasi yang dilalui para implementor dalam upaya mewujudkan tujuan dari kebijakan tersebut.

## **2. Model Implementasi**

Penerapan implementasi di dasari dari beberapa teori yang memaparkan model dalam proses implementasi yang dipaparkan sebagai berikut:

### **a. Teori George C. Edward III**

Edward III (Subarsono 2011:90-92) berpendapat bahwa keberhasilan Implementasi kebijakan di pengaruhi oleh empat faktor yaitu :

- 1) Komunikasi, Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh seorang implementor, seorang implementor



diwajibkan mengetahui target fokus dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, mengetahui apa yang harus di kerjakan, sehingga mampu mengurangi bentuk penyimpangan dalam implementasi kebijakan.

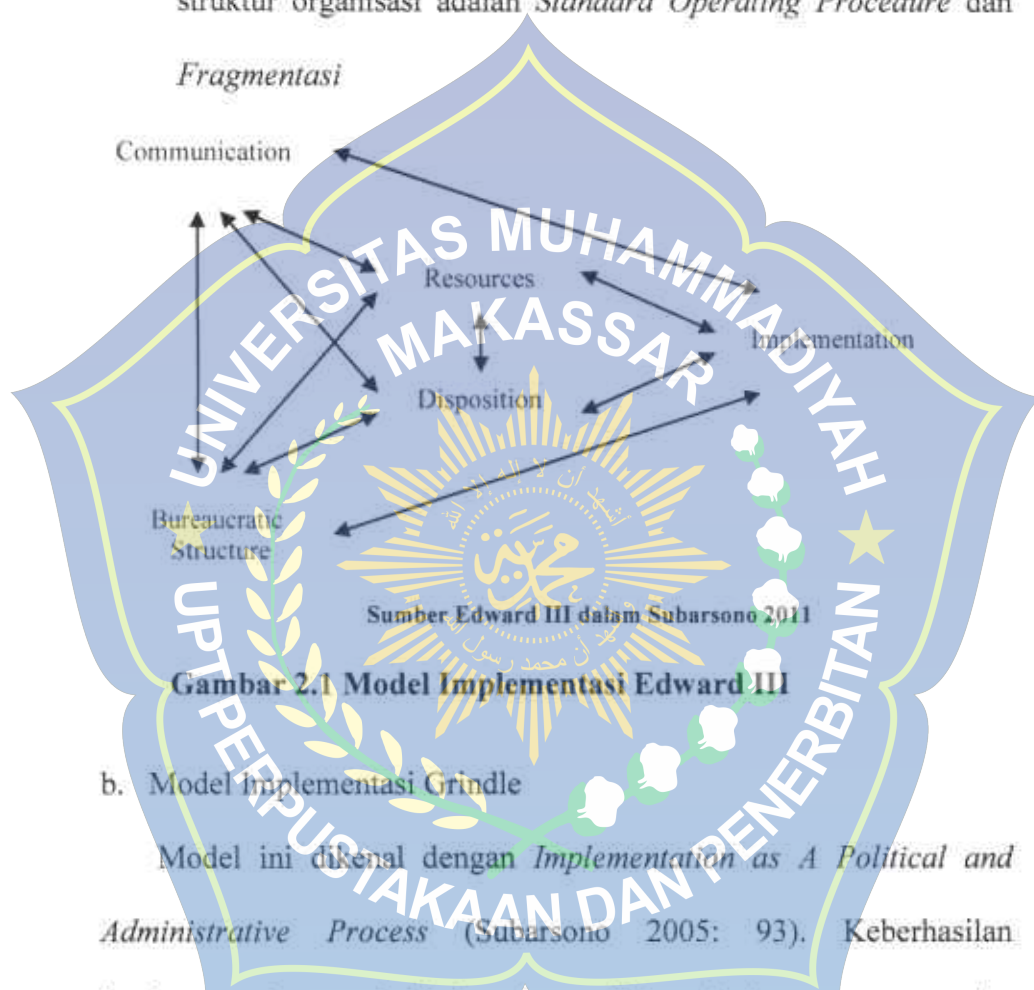
2) Sumber daya, jika implementor mengalami kekurangan sumber daya walaupun isi semua kebijakan sudah disampaikan dengan jelas dan konsisten oleh implementor, maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya tersebut biasanya berwujud kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3) Disposisi, disposisi merupakan karakter yang dimiliki seorang implementor seperti kejujuran, komitmen, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki sifat yang baik maka keberhasilan implementasi kebijakan pun tinggi, dan implementor mampu mengerjakan kebijakan dengan efektif seperti yang diharapkan pembuat kebijakan. Namun sebaliknya jika implementor memiliki sikap yang bersebrangan dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan tidak bisa berjalan sesuai yang diinginkan pembuat kebijakan.

4) Struktur Birokrasi, apabila struktur organisasi terlalu panjang maka birokrasi akan mengalami prosedur yang rumit dan kompleks, oleh karena itu struktur organisasi sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari



struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* dan *Fragmentasi*



**Gambar 2.1 Model Implementasi Edward III**

b. Model Implementasi Grindle

Model ini dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process* (Subarsono 2005: 93). Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang diinginkan. Keberhasilan suatu implementasi dapat dilihat dari dua hal yakni:

1) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakan.

2) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu dampaknya terhadap masyarakat secara individu atau kelompok dan tingkat perubahan yang terjadi.



**Gambar 2.2 Gambar Model Implementasi Grindle**

c. Model Implementasi Soren Winter

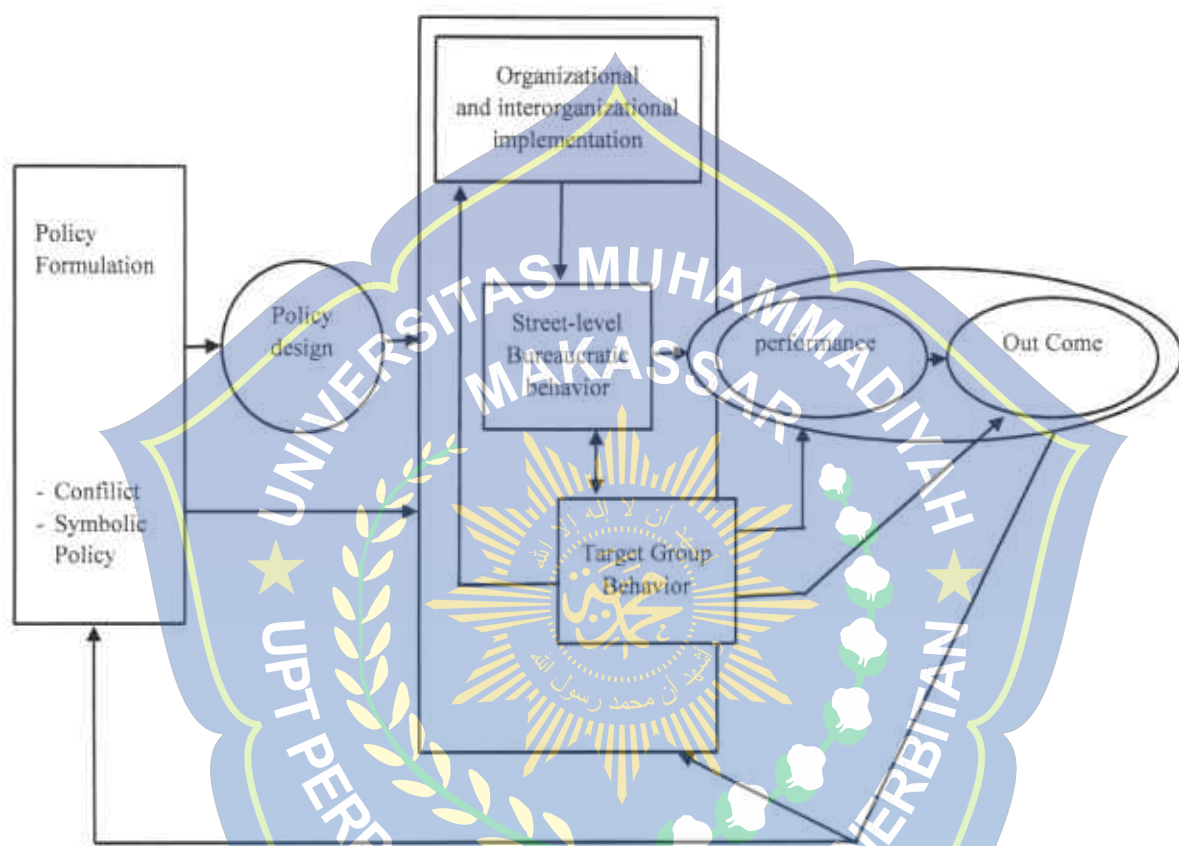
Winter (2003) mengidentifikasi tiga variable kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

- 1) Perilaku organisasi dan antarorganisasi, Dimensi-dimensinya adalah komitmen dan koordinasi antar organisasi. Penerapan kebijakan publik dalam mencapai hasil yang optimal, jarang berlangsung dengan kelompok sendiri, tanpa menggunakan organisasi lain sebagai pendukung atau piranti pelaksana. Implementasi kebijakan memerlukan hubungan antar organisasi

untuk membawa perubahan kebijakan umum ke dalam aturan yang jelas, dan ini berlangsung secara berkelanjutan dalam proses sosial yang dapat mengkonversi arah kebijakan melalui tindakan.

2) Perilaku Birokrasi Level Bawah, bahwa perilaku pelaksanaan kebijakan secara sistematis adakalanya „menyimpang“ dari tugas terkait dengan kewenangan selaku pelaksana kebijakan. Mereka lebih mengutamakan hubungan dengan masyarakat dalam penyampaian kebijakan. Karena itu, birokrasi level bawah menjadi aktor yang esensial dalam implementasi kebijakan public, dan kinerjanya sangat konsisten dengan standar program yang berkaitan dengan aktivitasnya.

3) Perilaku Kelompok Sasaran dalam implementasi kebijakan publik adalah sekelompok orang, organisasi, atau individu penerima jasa yang berperan bukan hanya dari sisi dampak kebijakan, tetapi juga dalam mempengaruhi kinerja implementasi program melalui tindakan positif dan negative.



**Gambar 2.3** Bagan Model Implementasi Soren Winter

### 3. Kebijakan Peternakan Sapi

Usaha peternakan merupakan suatu proses pengembangan teknologi, inovasi, spesialisasi yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong perubahan struktur ekonomi suatu wilayah. Proses teknologi dan inovasi tersebut mengubah struktur ekonomi suatu wilayah dari sisi penawaran agregat, sedangkan peningkatan pendapatan masyarakat yang mengubah volume dan komposisi konsumsi mempengaruhi struktur ekonomi dari sisi permintaan agregat Dodi (2010).

Sektor peternakan adalah sektor yang memberikan kontribusi tinggi dalam pembangunan pertanian. Sektor ini memiliki peluang pasar yang



sangat baik, dimana pasar domestik akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Semakin meningkatnya pendapatan penduduk maka permintaan produk-produk peternakan mengalami peningkatan Rusidiana (2011).

Ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Prawira (2015) Usaha pemeliharaan ternak disebut sebagai peternakan dan merupakan bagian dari kegiatan pertanian secara umum. Adapun jenis-jenis ternak diantaranya sapi, kerbau, domba, kambing, kelinci, ayam, itik, mentok, puyuh, ulat sutera, belut, dan ternak lebah madu. Masing-masing hewan ternak tersebut dapat diambil manfaat dan hasilnya. Hewan-hewan ternak ini dapat dijadikan pilihan untuk dternakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Kebijakan Pembangunan Peternakan Paradigma pembangunan peternakan adalah terwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif serta kreatif melalui peternakan tangguh berbasis sumberdaya lokal. Untuk mencapai paradigma tersebut dilakukan berbagai misi yaitu Sudardjat (2000) :

1. menyediakan pangan asal ternak
2. memberdayakan sumberdaya manusia peternakan
3. meningkatkan pendapatan peternakan
4. menciptakan lapangan kerja peternakan
5. melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya alam.

Kebijakan Pemerintah untuk mengembangkan sapi potong di peternak, tujuannya agar dapat memenuhi kebutuhan pangan asal daging dan meningkatkan pendapatan peternak. Bila dilihat dari kebutuhan daging sapi dan kerbau di masyarakat masih terkendali. Penentuan komoditas sapi potong sebagai prioritas unggulan, dapat meningkatkan pada kontribusi PDB, dan sekaligus sebagai komoditas terhadap PDB peternak Rusdiana dan Talib (2019)

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dijelaskan bahwa Negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45).

Pemerintah pusat maupun daerah perlu mengambil kebijakan diantaranya adalah optimalisasi fungsi peternakan, optimalisasi kebijakan bidang peternakan, dan optimalisasi sistem industri peternakan. Menurut Undang-Undang No.41 tahun 2014 Pasal 1 menjelaskan bahwa Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan Sumber Daya Fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, Budi Daya Ternak, Panen, Pascapanen, Pengolahan, Pemasaran, Pengusahaan, Pembiayaan, serta Sarana dan Prasarana Adjid (2012).

Pada prinsipnya kebijakan pembangunan harus berlandaskan kajian akademik atau dikenal dengan *policy based on science*. Selain itu suatu kebijakan secara teknis harus feasible dan dapat dilaksanakan oleh pelaku bisnis (stakeholder). Secara ekonomis menguntungkan (*profitable*) bagi semua pihak dan secara sosiologis dapat diterima (*acceptable*) masyarakat dan berdampak futuristik kedepan serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan.

Bahwa tujuan dari kebijakan pembangunan peternakan sapi potong adalah usaha meningkatkan produksi, dalam rangka ketersediaan produksi dalam negeri. Usahanya berkelanjutan, artinya ternak bukan hanya komoditi tapi juga sumberdaya. Dan usahanya menguntungkan, usaha ini mampu memberikan kesejahteraan bagi peternak.

Menurut Yasin (2013) keberadaan ternak ruminansia (Sapi, Kerbau, Domba dan Kambing) sangat strategis sebagai komponen dalam pengembangan kawasan karena ternak ini selain berfungsi sebagai ternak pedaging dan susu perah juga dapat dimanfaatkan tenaganya untuk mengolah lahan pertanian serta sebagai sumber pupuk organik. Disamping itu pemeliharaannya sangat mudah karena hampir 100% sumber pakannya bersumber dari rerumputan.

Ternak sapi potong mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional dalam mengemban misi peternakan, sehingga baik pemerintah pusat ataupun daerah perlu mengeluarkan kebijakan strategis untuk mendukung industri peternakan sebagai upaya peningkatan



ksejahteraan masyarakat. Adapun pentingnya tata kelola pemerintahan untuk kegiatan pertanian yaitu sebagai berikut Safitri (2011):

- a. Sumber pangan hewani asal ternak, berupa daging dan susu.
- b. Sumber pendapatan masyarakat terutama petani ternak.
- c. Penghasilan devisa yang sangat diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional.
- d. Menciptakan lapangan kerja.
- e. Sasaran konservasi lingkungan terutama lahan melalui daur ulang pupuk kandang.
- f. Pemenuhan sosial budaya masyarakat dalam ritus adat atau kebudayaan.

Khusus subsektor peternakan yang selama ini kurang mendapat perhatian karena pemerintah lebih fokus pada usaha peningkatan beras mulai menggigit perekonomian nasional. Populasi ternak utama seperti sapi, kerbau dan kambing mengalami pengurasan yang terus meningkat setiap tahun. Pengurasan yang terus berlangsung ini mengancam keberlanjutan produksi hasil ternak dalam negeri, sehingga dikuatirkan jumlah impor terus meningkat. Statistik Peternakan (1995 dan 2006) memperlihatkan bahwa 25 persen produksi daging dalam negeri berasal dari impor sedangkan Direktorat Peternakan tahun 2007 melaporkan bahwa Indonesia terpaksa impor daging 37,2 persen (Direktorat Jenderal Peternakan, 2007). Hal ini diperlihatkan oleh peningkatan impor ayam broiler dan jumlah sapi bakalan yang akan digemukkan dalam negeri telah mencapai angka fantastis yakni



450 ribu ekor. Perkembangan impor berbagai jenis ternak untuk tujuan meningkatkan produksi disertai dengan peningkatan impor bahan baku pakan sehingga Indonesia sebenarnya hanya mendapat nilai tambah dari tenaga kerja. Pada sisi lain kita akan selalu menghadapi ancaman wabah Avian Influenza, Antrax, Mulut dan Kuku, dan Sapi Gila Yudsja dan Winarso (2009).

Dalam upaya kebijakan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan peternakan perlu dipenuhi syarat kecukupan mencakup Yudsja dan Winarso (2009):

1. Undang Undang Peternakan yang Akomodatif Undang-undang Peternakan 1967 tidak lagi sesuai dengan perubahan-perubahan besar yang terjadi dalam dunia peternakan. Kita membutuhkan undang-undang yang dapat menggerakkan dan melindungi baik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, aktivitas investor dan masyarakat. Undang-Undang yang sesuai memberikan kekuatan pada pemerintah secara politis dalam memperoleh prioritas pembangunan peternakan. Pada sisi lain, undang-undang peternakan yang sesuai memberikan dampak positif kepada investor dalam subsektor peternakan, terutama dalam mendapatkan perlindungan hukum terhadap usaha dan investasi.
2. Pengembangan Iptek Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu tidak dapat dihindarkan dan ini sangat terkait dengan pembangunan sumberdaya manusia. Penelitian

peternakan harus mempunyai kerangka yang jelas dalam mewujudkan sistem peternakan yang diharapkan. Dalam hal ini penelitian peternakan mempunyai fungsi strategis karena berfungsi memenuhi syarat keharusan dalam pengembangan sumberdaya ternak. Sasaran penelitian peternakan jelas kepada perbaikan mutu genetik ternak, pemanfaatan bahan baku pakan dalam negeri seluas-luasnya dan sistem manajemen budidaya yang efisien. Pengembangan ilmu pengetahuan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan peternakan harus juga mempertimbangkan keserasian dengan konsep alam yakni ekosistem. Peternakan berdasarkan ekosistem menjamin keberlanjutan pertumbuhan produksi. Suatu bentuk pengembangan sistem peternakan yang ekologis adalah integrasi wilayah-wilayah perkebunan dengan usaha penggemukan ternak ruminansia seperti sapi, kambing dan domba. Contoh lain adalah pengembangan peternakan berazaskan zero waste di mana ternak berfungsi sebagai media bioindustri bagi merubah hijauan sisa tanaman menjadi produk berguna. Pada tahapan lanjut, ternak dapat menghasilkan pupuk anorganik untuk kebutuhan tanah dan tanaman. Sistem zero waste ini dapat diterapkan dalam skala kecil (kawasan) maupun skala regional atau nasional dan tentu dibutuhkan pembangunan kelembagaan atau organisasi komersil bagi memungkinkan hal itu terjadi.

3. Penyediaan Kawasan Suatu kawasan peternakan mencakup sebuah wilayah yang mempunyai kerapatan penduduk jarang, wilayah kurang subur, wilayah yang kemungkinan besar tidak akan dijadikan wilayah pemukiman, merupakan wilayah lahan kering, dekat dengan sumber air atau air dapat dialirkan ke kawasan itu. Pengadaan air di kawasan-kawasan tersebut merupakan investasi publik. Pada langkah selanjutnya, Pemerintah sebaiknya memetakan seluruh kawasan yang memenuhi syarat yang terdapat di seluruh Indonesia dan memberikan arahan kawasan-kawasan mana yang dicadangkan bagi peternakan. Pada wilayah yang dicadangkan itu, pemerintah menyediakan pelayanan infrastruktur seperti jalan raya (jika belum ada), saluran air irigasi bagi penggunaan pengairan HMT dan pemeliharaan ternak. Usaha pemetaan ini akan sangat membantu investor sehingga mereka merasa mendapat perlindungan dan keyakinan akan keberhasilan usaha. Selain itu, diperlukan pula pelayanan dalam bentuk investasi publik yang lain yakni pembangunan pusat-pusat pengendalian penyakit. Pada sisi lain, berdasarkan kriteria kawasan tersebut di atas, hanya sebagian kecil pulau Jawa dapat menyediakan kawasan semacam itu, antara lain pulau Jawa bagian selatan. Namun, di luar Jawa dapat ditemukan lebih banyak kawasan.



4. Pelayanan Kredit dan Pembiayaan Untuk mempercepat perkembangan sektor 2 dan 3 maka pemerintah dapat memberikan pelayanan kredit dengan fasilitas khusus serta pembiayaan untuk meningkatkan kemampuan modal peternakan sektor 3.

Sebagai kesimpulan Sistem peternakan yang kita harapkan pada masa depan tentu belum tentu jelas ujungnya seperti apa dan walaupun jelas tidak bisa dipaksakan melalui tindakan tangan besi. Apa yang dapat kita rencanakan adalah bagaimana fungsi peternakan masa depan yang kita harapkan dan bagaimana arah kebijakan yang diperlukan untuk mewujudkannya. Jika itu jelas, maka akan konkrit pula peran berbagai pihak seperti pemerintah, investor dan masyarakat. Pembangunan akan berlangsung cepat jika semua pihak berpartisipasi secara bebas menurut perannya masing-masing di atas roadmap pembangunan peternakan yang telah disepakati. Dalam kerangka ini, kita jelas membutuhkan Undang-Undang Peternakan yang mendukung apa yang telah dibahas di atas.

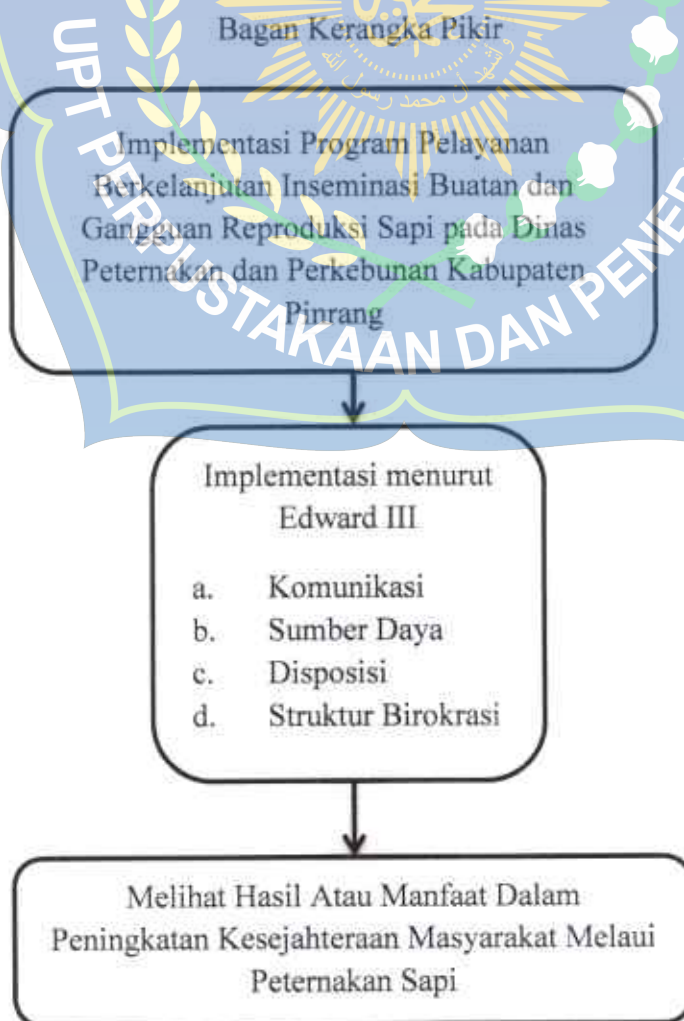
### C. Kerangka Pikir

Dalam menuju perkembangan pembangunan Indonesia baik pemerintah pusat maupun daerah perlu mendorong kebijakan strategis guna menopang kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor. Fokus pemerintah dalam bidang pertanian seperti padi, jagung, kedelai dan lain-lain membuat komoditi masyarakat di bidang peternakan menjadi terabaikan, dengan



demikian pemerintah perlu mendorong peternakan sebagai sumber pendapatan negara

Berdasarkan dengan teori yang di angkat penulis tentang Implementasi program Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang maka penulis membangun kerangka pikir sesuai dengan teori Edward III dalam melihat faktor implementasi suatu program di paparkan dalam gambar sebagai berikut:



**Gambar 2.4 Kerangka Konseptual**

#### **D. Fokus Penelitian**

Penetapan fokus penelitian merupakan hal terpenting dalam penelitian kualitatif, karena untuk memberikan batasan studi dan mengarahkan penelitian. Berdasarkan pada bagan kerangka pikir maka yang menjadi fokus penelitian penulis adalah Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Program Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang.

#### **E. Deskripsi Fokus Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang menjadi deskripsi atau gambaran dari fokus penelitian yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana cara Dinas Peternakan dan Perkebunan mengimplementasikan kebijakan serta melakukan sosialisasi program pengembangan ternak sapi kepada masyarakat khususnya para peternak untuk meningkatkan produksi sapi.
2. Sumber daya, dalam hal ini jika Dinas Peternakan dan Perkebunan mengalami kekurangan sumber daya alam maupun sumber daya manusia lainnya walaupun isi semua kebijakan sudah disampaikan dengan jelas kepada masyarakat, maka pelaksanaan program pengembangan ternak sapi tidak akan berjalan dengan efektif.

3. Disposisi, disposisi merupakan karakter yang dimiliki oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan seperti kejujuran, komitmen, dan sifat demokratis. Apabila Dinas Peternakan dan Perkebunan memiliki sifat yang baik maka keberhasilan implementasi program pengembangan ternak sapi akan terlaksana dengan baik, serta Dinas Peternakan dan Perkebunan mampu melaksanakan kebijakan dengan efektif seperti yang diharapkan. Namun sebaliknya jika Dinas Peternakan dan Perkebunan memiliki sikap yang sebaliknya, maka proses implementasi program pengembangan ternak sapi tidak dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
4. Struktur Birokrasi, apabila struktur organisasi dari Dinas Peternakan dan Perkebunan terlalu panjang maka akan mengalami prosedur yang rumit dan kompleks yang dapat mempersulit masyarakat khususnya para peternak, oleh karena itu struktur organisasi Dinas Peternakan dan Perkebunan sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan program pengembangan ternak sapi di Kabupaten Pinrang.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

##### 1. Waktu penelitian

Waktu yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini selama dua bulan dan dilakukan setelah seminar proposal. Yang bertempat di Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang.

##### 2. Lokasi penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang. Adapun alasan memilih obyek lokasi penelitian tersebut adalah karena menjadi lokasi dalam menjalankan program pelan itu bagus pada peternakan sapi.

#### B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang Implementasi Program Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang adalah :

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif dilapangan.

##### 2. Tipe Penelitian



Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan studi kasus merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang Pengembangan Ternak Sapi.

### C. Informan

Informan penelitian ini dipilih dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan penelitian. Adapun informan dari penelitian ini berdasarkan Implementasi Program Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Informan	Inisial	Jabatan
1.	Kahar, S.Pt, M.Si	KH	Kasi Budidaya dan Reproduksi Peternakan
2.	Mahyuddin Rahman, S.Pt, M.Si	MR	Kasi Penyuluhan Peternakan
3.	Syamsul Alam, SP	SA	Petugas Inseminasi
4.	Nurlina Gaffar, SP	NG	Petugas Inseminasi
5.	I Gede Adika	GA	Dokter Hewan
6.	Abdillah	AB	Asisten Teknis Reproduksi
7.	Muharram	MH	Petugas Pemeriksa Kebuntingan
8.	Sumardi	SM	Peternak
9.	Syarifuddin	SF	Peternak
10.	La Kamba	LK	Peternak
11.	H. Kadir	HK	Peternak

Jumlah Total	11	Informan
--------------	----	----------

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung yang berkaitan dengan Program Pengembangan Ternak Sapi Pada Dinas Peternakan dan Perkebunan di Kabupaten Pinrang.

##### 2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.

##### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan langkah terpenting dalam memperoleh temuan-temuan hasil dari penelitian. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah data dari hasil penelitian menjadi data, dimana data didapatkan, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk memberi kesimpulan masalah atau persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Model analisis data yang di gunakan yaitu, model analisis interaktif. Model ini memiliki 3 komponen utama. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014: 246-252) ketiga komponen tersebut yaitu:

##### **1. Reduksi data**

Reduksi data adalah komponen pertama dalam menganalisis data yang memperpendek, mempertegas, membuang hal yang tidak penting, membuat fokus dan mengatur data menjadi lebih baik sehingga simpulan peneliti mampu dilakukan.

##### **2. Sajian Data**

Sajian data merupakan kesimpulan informasi yang sistematis dan logis dan mudah untuk dipahami.



### 3. Penarikan kesimpulan

Dalam awal penelitian, peneliti harus mulai mengerti apa maksud dari hal-hal yang ia temui dengan mencatat berbagai proporsi dan peraturan-peraturan sehingga dalam penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.

## F. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2014:39), Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu yakni sebagai berikut:

### 1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada, kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

### 2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara, lalu



dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

### 3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain diberi tugas melakukan pengumpulan data.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Kabupaten Pinrang

Tersebutlah suatu peristiwa di Sawitto pada waktu pemerintahan La Paleteang Raja IV, Kerajaan Sawitto. Dimana pada waktu itu terjadi peperangan antara Sawitto dan Gowa, Perang ini terjadi karena Gowa sebagai kerajaan besar, berusaha untuk menguasai Sawitto yang kondisi dan potensinya menjanjikan setumpuk harapan. Berbagai upaya yang telah digunakan Gowa untuk menguasai Sawitto melalui agresi dan terjadilah perang antar Sawitto dan Gowa sekitar Tahun 1540.

Prajurit - parjurit Sawitto dengan gigih mengadakan perlawanan abdi kerajaan mati - matian mempertahankan dan membela bumi ini berkesudahan dengan kekalahan dipihak Sawitto sehingga raja La Paleteang dan isterinya dibawa ke Gowa sebagai tanda kemenangan Gowa atas Sawitto. Awan yang meliputi kesedihan rakyat atas kepergian sang raja yang arif dan bijaksana. Upaya yang dilakukan membebaskan sang raja bersama permaisuri kerajaan Sawitto. Akhirnya dalam suatu musyawarah kerajaan terpilih dua Tobarani, yaitu Tolengo dan To Kipa untuk mengemban tugas membebaskan sang raja beserta permaisurinya. Kemudian berangkatlah kedua bersaudara tersebut ke Gowa yang berhasil membawa pulang raja La Paleteang beserta permaisurnya. Kedatangan raja

bersama permaisuri, disambut dengan luapan kegembiraan dan di elu - elukan sepanjang jalan menuju istana. dibalik kegembiraan itu, mereka terharu melihat kondisi sang raja yang mengalami banyak perubahan seraya mengatakan " PINRA KANA NI TAPPA NA DATUE POLE RI GOWA " Yang artinya wajah raja menagalami perubahan sekembali dari Gowa. Kata-kata inilah senantiasa terlontar dari orang - orang yang menyertai sang raja. Ketika raja beristirahat sejenak sebelum tiba di istana bertitahlah sang raja kepada pengantarnya untuk menyebut tempat tersebut dengan nama PINRA.

Sumber lain ini mengatakan pemukiman kota Pinrang yang dahulunya rawa-rawa yang selalu tergenang air membuat masyarakat senantiasa berpindah-pindah mencari wilayah pemukiman yang bebas genangan air, berpindah-pindah atau berubah-ubah pemukiman, dalam bahasa bugis disebut "PINRA - PINRA ONROANG" setelah masyarakat menemukan tempat pemukiman yang baik, maka diberinya tempat tersebut:PINRA-PINRA.Dari kedua sejarah yang berbeda itu lahirlah istilah yang sama yaitu " PINRA " kemudian kata itu dalam perkembangannya dipengaruhi oleh intonasi dan dialek bahasa bugis sehingga menjadi Pinrang yang sekarang ini diabadikan menjadi Kabupaten Pinrang.

Sebagaimana diketahui bahwa ketika jepang masuk di pinrang sekitar tahun 1943 sistem pemerintahan warisan kolonial dengan struktur lengkap yang terdiri dari 4 (Empat) swapraja, masing - masing Swapraja Sawitto, Swapraja Batu Lappa, Swapraja Kassa dan Swapraja Suppa. Ketika



Pinrang menjadi *onder-afdeling* di bawah afdeling Parepare Sementara afdeling Parepare adalah salah satu afdeling dari tujuh afdeling yang ada di propinsi Sulawesi.

Dengan ditetapkannya PP Nomor 34/1952 tentang perubahan daerah Sulawesi selatan, pembagian wilayahnya menjadi menjadi daerah swatantra. Pertimbangan diundangkannya PP tersebut adalah untuk memenuhi keinginan rakyat dan untuk memperbaiki susunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Daerah swatantra yang dibentuk adalah sama dengan wilayah afdeling yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur Timur besar (GROTE GOSTE) tanggal 24 juni 1940 nomor 21, kemudian diubah oleh Keputusan Gubernur Sulawesi nomor 618/1951. Perubahan adalah kata afdeling dirubah menjadi daerah swatantra dan onder afdeling menjadi kewedanaan. Dengan perubahan tersebut maka onder afdeling pinrang berubah menjadi kewedanaan pinrang yang membawahi empat swapraja dan distrik. dengan status demikian inilah pemerintahan senantiasa mengalami pasang surut ditengah-tengah pasang surutnya keadaan pemerintahan, upaya memperbaiki struktur dan penyelenggaraan pemerintahan di satu sisi, disamping memenuhi kebahagiaan dan keinginan rakyat. Maka pada tahun 1959 keluarlah satu undang-undang yang dikenal dengan undang-undang nomor 29/1959 yang berlaku pada tanggal 4 juli 1959 tentang pembentukan daerah-daerah TK.II di Sulawesi yang praktis. Membentuk Daerah Tingkat II Pinrang pula. namun hal ini belum dapat dijadikan sebagai patokan lahirnya Kabupaten Daerah TK.II



Pinrang. Berhubung unsur Pemerintahannya yang merupakan organ atau bagian yang belum ada.

Setelah keluarnya surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: UP-7/3/5-392 tanggal 28 Januari 1960 yang menunjuk H.A. Makkoelaoe menjadi Kepala Daerah TK. II Pinrang. Karena pada saat itu unsur atau organ sebagai perangkat daerah otonomi telah terpenuhi, kemudian dikaji melalui suatu simposium yang dilakukan oleh kelompok pemuda khususnya KPMP Kabupaten Pinrang dan diteruskan kepada DPRD untuk dituangkan kedalam suatu PERDA tersendiri.

a. Letak Geografis

Kabupaten Pinrang terletak di ujung utara bagian barat dari Wilayah propinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis terletak antara 3019'13" – 4010'30" Lintang Selatan (LS) dan 1190'26'30" – 1190'47'20" Bujur Timur (BT). Kabupaten Pinrang terletak dibagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten ini dibatasi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Sidenreng Rappang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kotamadya Parepare
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar (Sulbar) dan Selat Makassar.

Wilayah administratif Kabupaten Pinrang terbagi dalam 12 Kecamatan dan 108 Desa/Kelurahan (39 Kelurahan dan 69 Desa) dengan

luas 1.961,77 Km<sup>2</sup>. Adapun Kecamatan Lembang merupakan kecamatan terluas dengan luas 733,09 Km<sup>2</sup>.

Tabel 4. 1 Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Pinrang

No.	Kecamatan	Luas (KM <sup>2</sup> )	Kelurahan	Desa
1.	Suppa	74.2	2	8
2.	Mattiro Sompe	96.99	2	7
3.	Lanrisang	73.01	1	6
4.	Mattiro Bulu	132.49	2	7
5.	Watang sawitto	58.97	8	-
6.	Paleteang	37.29	6	-
7.	Tiroang	77.73	5	-
8.	Patampanna	136.85	4	7
9.	Cempa	90.3	1	6
10.	Duampanna	291.86	5	10
11.	Batulappa	158.99	1	4
12.	Lembang	733.09	2	14
	Total	1961.77	39	69

(Sumber: Kabupaten Pinrang dalam Angka 2018)

#### b. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 sebanyak 372.230 jiwa yang terdiri dari 180.586 jiwa penduduk laki-laki dan 191.644 penduduk perempuan, dengan penduduk terbanyak berada di Kecamatan Watang Sawitto yaitu sebesar 55.972 jiwa Rasio jenis kelamin (sex ratio) adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Rasio

jenis kelamin Kabupaten Pinrang tahun 2017 sebesar 94,2. Artinya, dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 94 penduduk laki-laki.

Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi. Kepadatan penduduk dapat dijadikan salah satu indikator penyebaran penduduk di suatu wilayah. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 sekitar 189,7 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Watang Sawitto yaitu sekitar 1.076 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Lembang yaitu sekitar 54 jiwa/km.

c. Potensi Wilayah

Sektor Pertanian memiliki peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Pinrang. Pada tahun 2017, berkontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB sebesar 48,67 persen. Beberapa komoditas tanaman pangan di Pinrang antara lain: padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang-kacangan. Produksi tanaman padi di Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 mencapai 653.979 ton yang dipanen dari areal seluas 105.839 Ha atau dengan produktivitas sebesar 61,79Ku/Ha. Bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2016, produksi tahun 2017 mengalami kenaikan dengan produksi tahun 2016 sebesar 625.312 ton dengan areal panen seluas 106.302 Ha atau dengan produktivitas sebesar 58,9 Ku/Ha. Produksi tanaman jagung pada tahun 2017 mencapai 158.232 ton dengan luas areal panen sebesar 19.422 Ha atau dengan produktivitas sebesar 81,47 Ku/Ha. Produksi tanaman jagung tahun 2016 mengalami peningkatan dibanding



tahun 2017 dimana produksi jagung tahun 2017 sebesar 138.010 ton dengan luas areal panen sebesar 20.794 Ha atau dengan produktivitas sekitar 66,37 Ku/H.

Tanaman Perkebunan antara lain; kakao, kelapa dan kopi robusta. Produksi kakao pada tahun 2017 mencapai 11.607 ton yang dipanen dari areal seluas 19.585 Ha Selanjutnya, tanaman kelapa dalam dengan produksi sebesar 3.270,46 ton yang dipanen dari areal seluas 8.682Ha. Tanaman dengan produksi terbanyak ketiga adalah kopi robusta dengan produksi sebesar 2.562 ton yang dipanen dari areal seluas 3.774Ha.

Bidang Peternakan seperti sapi potong, kerbau, kuda, kambing/domba, ayam dan itik. Populasi ternak pada tahun 2017 sebanyak 2.779.625 ekor, terdiri dari 1.746.790 ekor ayam petelur dan 251.535 ekor ayam pedaging.

Di bidang perikanan kabupaten Pinrang pada tahun 2017 produksi perikanan tangkap di perairan umum mencapai 3.571,1 Ton, terjadi peningkatan sebesar 0,01 persen dari tahun 2016.

## **2. Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang**

Visi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang adalah Terwujudnya masyarakat peternakan dan perkebunan yang sejahtera melalui pengelolaan peternakan dan perkebunan secara lestari, berkelanjutan, berdaya saing, serta pemanfaatan teknologi tepat guna.

Sedangkan misi :



- a. Mewujudkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan perkebunan yang lestari, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- b. Mewujudkan usaha peternakan dan perkebunan yang berdaya saing berbasis agribisnis dan agroindustry
- c. Mewujudkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat peternakan dan perkebunan melalui terciptanya peluang usaha peternakan dan perkebunan
- d. Mewujudkan pemberdayaan kelompok tani peternakan dan perkebunan melalui peningkatan daya saing dan nilai tambah produk peternakan dan perkebunan

Motto : Membangun peternakan dan perkebunan yang berkelanjutan melalui P3K (peningkatan, produksi, dan kualitas) untuk kesejahteraan Masyarakat.

a. Tugas Pokok

Dinas peternakan dan perkebunan kabupaten pinrang dibentuk berdasarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah serta peraturan Bupati Pinrang nomor 46 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas peternakan dan perkebunan kabupaten pinrang dengan tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang peternakan dan perkebunan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi Dinas Peternakan

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengembangan produksi dan agribisnis peternakan dan perkebunan
- 2) Penetapan pembinaan teknis pengembangan usaha dan sumber daya peternakan dan tanaman perkebunan
- 3) Perumusan dan penetapan pedoman penanggulangan hama pengganggu dan penyakit tanaman
- 4) Penetapan pedoman penerapan dari pengembangan teknologi serta spesifikasi alat dan mesin
- 5) Perumusan pedoman pelayanan pemberian izin bidang peternakan dan perkebunan.

c. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekertariat terdiri dari :
  - a) Sub bagian program
  - b) Sub bagian umum kepegawaian dan hukum, dan
  - c) Sub bagian keuangan

- 3) Bidang Pengembangan Produksi dan Agribisnis Peternakan terdiri dari :
    - a) Seksi budidaya dan reproduksi peternakan
    - b) Seksi pakan prasana dan sarana peternakan, dan
    - c) Seksi agribisnis dan perizinan usaha peternakan
  - 4) Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Penyuluhan Peternakan terdiri dari :
    - a) Seksi kesehatan hewan
    - b) Seksi kesehatan masyarakat veteriner, dan
    - c) Seksi kelembagaan, ketenagaan dan perkebunan
  - 5) Bidang Pengembangan Perkebunan terdiri dari :
    - a) Seksi perbenihan dan produksi perkebunan
    - b) Seksi prasarana dan sarana perkebunan, dan
    - c) Seksi perlindungan tanaman perkebunan
  - 6) Bidang Agribisnis dan Penyuluhan Perkebunan terdiri dari :
    - a) Seksi kelembagaan, ketenagaan dan penyuluhan perkebunan
    - b) Seksi pengolahan, pemasaran dan promosi hasil perkebunan, dan
    - c) Seksi bimbingan usaha perkebunan
  - 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas: UPTD IPR Malimpung
  - 8) Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Alur Pelaksanaan Inseminasi buatan

Inovasi Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi (PELAN ITU BAGUS), pelaksanaannya dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Pembentukan Tim Pembina dan evaluasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan (IB) dan Gangguan Reproduksi Sapi tingkat kabupaten, terdiri dari :
  - a) Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang
  - b) Sekretaris Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang
  - c) Kepala Bidang Pengembangan Produksi dan Agribisnis Peternakan
  - d) Kepala Bidang Kesehatan hewan dan Masyarakat Veteriner
  - e) Kepala Seksi Budidaya dan Reproduksi Ternak
  - f) Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak
  - g) Staf yang menangani pelaporan.
- 2) Pembentukan Tim pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi yang terdiri dari :
  - a) Dokter Hewan
  - b) Asisten Teknis Reproduksi (ATR)
  - c) Pemeriksa Kebuntingan (PKB)
  - d) Petugas Inseminator



- e) Petugas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan (PPKH)
- 3) Pemetaan dan pendataan kelompok ternak sentra pengembangan sapi. Pemetaan dan pendataan ini bertujuan untuk mengetahui populasi ternak sapi yang ada dalam satu kelompok ternak untuk selanjutnya dibuatkan jadwal pelayanan.
- 4) Petugas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan (PPKH), mensosialisasikan jadwal pelayanan tim kepada kelompok sasaran penerima manfaat dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat.
- 5) Kegiatan Tim pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi dalam satu kelompok ternak, diawali dengan pemeriksaan kebuntingan (PKB). Populasi sapi betina induk diperiksa dan dikelompokkan. Pengelompokan ini terdiri dari :
- a) Betina induk beranak dengan usia anak dibawah dua bulan
  - b) Betina induk bunting
  - c) Betina induk tidak bunting
  - d) Betina induk yang terindikasi mengalami gangguan reproduksi
- 6) Sapi betina induk yang tidak bunting, ditangani oleh petugas inseminator. Selanjutnya diadakan pengamatan dan diteksi tanda-tanda birahi. Siklus birahi pada sapi selama 21 hari disesuaikan dengan lama petugas memberikan pelayanan pada satu kelompok

ternak. Dengan harapan selama 21 hari induk sapi yang tidak bunting dapat memperlihatkan tanda-tanda birahi dan segera dilakukan inseminasi Buatan (IB)

- 7) Sapi betina induk yang terindikasi mengalami gangguan reproduksi segera ditangani oleh dokter hewan dan asisten teknis reproduksi (ATR). Setelah sapi betina induk dinyatakan sembuh, selanjutnya diberikan injeksi hormon. Injeksi hormon ini bertujuan untuk memicu timbulnya birahi dan segera dilaksanakan inseminasi buatan (IB).
- 8) Selain pelayanan inseminasi buatan (IB) dan gangguan reproduksi sapi, dilakukan juga sosialisasi dan penyuluhan tentang manajemen pemeliharaan sapi meliputi :
  - a) Sistem Perkandungan
  - b) Manajemen Pakan
  - c) Manajemen Kesehatan Hewan
- 9) Setelah 21 hari memberikan pelayanan berkelanjutan dalam satu kelompok sasaran penerima manfaat, dan telah dipastikan bahwa semua populasi sapi induk betina telah terinseminasi, selanjutnya beralih ke kelompok lain untuk melakukan pelayanan yang sama. Monitoring kelompok sebelumnya tetap dilaksanakan untuk antisipasi timbulnya birahi ulang. Begitu pula dengan pengaduan atau laporan peternak tetap akan dilayani.

10) Pelaporan hasil pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan (IB) dan gangguan reproduksi sapi yang telah dilakukan dalam satu kelompok dilaporkan ke pos pelayanan kabupaten secara berkala meliputi :

- a) Laporan kepemilikan sapi terdiri dari populasi pejantan, induk betina produktif dan anak
- b) Laporan jumlah betina produktif akseptor IB
- c) Laporan hasil pelaksanaan inseminasi buatan (IB) terdiri dari jumlah sapi yang dinselminasi dan jumlah straw (semen beku) yang digunakan.
- d) Laporan hasil pelaksanaan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB)
- e) Laporan hasil pelayanan gangguan reproduksi sapi, terdiri dari jumlah sapi yang terindikasi mengalami gangguan reproduksi dan penggunaan hormon dalam rangka sinkronisasi penyerentakan birahi.

11) Untuk akurasi data, maka laporan harian tentang pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi, juga dilaporkan secara online via sms ke website ISIKHNAS.

## **B. Hasil Penelitian**

Kebutuhan pangan masyarakat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam membentuk kebijakan ataupun program yang mengarah kepada ketersediaan pangan dalam suatu wilayah. Kebutuhan pangan tidak hanya berasal dari tumbuh-tumbuhan namun juga dari hewani seperti peternakan.



Kebutuhan gizi masyarakat harus seimbang yang di topang dengan ketersediaan protein, zat gizi dan lemak yang banyak terdapat pada konsumsi pangan hewani.

Dalam menjaga ketersediaan tersebut pemerintah Sulawesi Selatan mendorong program upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting agar kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari hewan ternak selalu tersedia. Melalui program Pelan Itu Bagus yang di inisiasi oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang dengan menjaga ketersediaan pangan yang berasal dari peternakan sapi dengan metode inseminasi buatan (IB) agar reproduksi sapi dapat terjaga dengan baik.

Pada hasil penelitian penulis membahas tentang Implementasi Program Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi ternak sapi dalam meningkatkan produksi peternakan sapi di kabupaten pinrang dapat dilihat dari empat indikator yang digunakan dalam observasi dan wawancara langsung yaitu, Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang diuraikan penulis sebagai berikut:

### **1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan suatu tindakan yang memungkinkan kita mampu menerima dan memberikan informasi atau pesan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Secara teoritis, tindakan komunikasi berdasarkan pada konteks terbagi menjadi beberapa macam, yaitu konteks komunikasi



interpersonal, komunikasi intrapersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa.

Dalam meningkatkan peningkatan produksi ternak sapi di Kabupaten Pinrang aparatur terkait yaitu Dinas Peternakan dan Perkebunan melalui program pelan itu bagus membangun pola komunikasi yang baik dengan tim yang terlibat dalam inseminasi buatan dan juga masyarakat peternak selaku target dan sasaran dari program tersebut.

Dalam wawancara mengenai sosialisasi pelan itu bagus yang dilakukan peneliti dengan Kasi Budidaya dan Reproduksi Peternakan:

“Membangun komunikasi merupakan acuan terpenting dalam pelaksanaan program. Terlebih dalam pada program pelan itu bagus mengarah kepada upaya peningkatan produksi ternak sapi melalui inseminasi buatan. Agar program tersebut berjalan sesuai dengan harapan pemerintah maka di bentuk tim yang terdiri dari dokter hewan, asisten teknis reproduksi, pemeriksa kebuntingan, inseminator dan juga masyarakat peternak itu sendiri sebagai sasaran dan target dari program ini. Bentuk komunikasi yang dilakukan adalah menentukan strategi yang tepat agar program ini dapat terlaksana dengan baik serta memberikan dampak kepada peningkatan produktivitas bagi peternak.” (Wawancara dengan KH 15/12/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa pembentukan tim dalam rangka pelaksanaan inseminasi buatan agar tingkat produktivitas peternakan sapi dapat terjaga dengan membangun pola komunikasi agar setiap tim memahami tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan program peningkatan produksi peternakan sapi.

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dimana komunikator memberikan pesan kepada komunikan baik verbal maupun nonverbal melalui suatu saluran (*channel*) kemudian pesan tersebut

mendapatkan tanggapan dari komunikan sehingga terjadi kesepahaman antara komunikator dengan komunikan.

Kesalahan utama masyarakat dalam pengembangan peternakan sapi adalah pada manajemen pemeliharaan sapi sehingga beberapa sapi tidak berproduksi dengan baik akibat dari penyakit yang menyerang ternak tersebut. Sehingga pola komunikasi kepada masyarakat melalui penyuluhan dengan memberikan pola manajemen yang baik dalam proses pemeliharaan yang baik. Pernyataan ini di dukung oleh dokter hewan yang mengatakan bahwa:

“Kebanyakan ternak sapi yang kami data itu mengalami gangguan reproduksi akibat dari kesalahan peternak sendiri dalam manajemen pemeliharaan, sehingga memang di lapangan selain memberikan pelayanan inseminasi buatan kami juga memberikan arahan seperti sosialisasi terhadap masyarakat terkait pola-pola pemeliharaan dan penanganan peternakan sapi yang benar. Memberikan pemahaman kepada masyarakat saya fikir merupakan langkah yang baik agar kedepan para peternak benar-benar memahami proses peningkatan produktivitas ternak sapi.” (Wawancara dengan GA 15/12/2020).

Sejalan dengan wawancara tersebut kepala seksi penyuluhan peternakan juga memberikan tanggapan yang sama:

“Selama ini kami melihat kondisi dilapangan masih banyak dari masyarakat yang belum memahami terkait peternakan sapi termasuk dalam pemeliharaannya sehingga sapi-sapi sulit berproduksi. Para peternak juga kurang memperhatikan pakan yang digunakan yang berdampak kepada permasalahan reproduksi sapi itu sendiri.” (Wawancara dengan MR 15/12/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan dalam pelaksanaan program pola komunikasi yang dilakukan tim Inseminasi buatan melalui penyuluhan kepada masyarakat peternak tentang tata cara peternakan sapi yang benar sehingga sapi dapat berproduksi dengan baik.

Komunikasi berjalan dengan baik apabila terjadi saling pengertian antara komunikator dengan komunikan, dimana sudah terjadi kesepahaman makna pesan antara komunikator dengan komunikan. Dalam hal seperti inilah komunikasi yang dilakukan telah berhasil baik atau komunikatif.

Pelaksanaan program pelan itu bagus dalam upaya peningkatan produktivitas peternakan sapi di Kabupaten Pinrang dengan membangun komunikasi terlebih dahulu kepada pemerintah setempat dan peternak sebagai kelompok sasaran tentang jadwal pelayanan tim. Dengan demikian para peternak dapat mempersiapkan diri ketika tim pelayanan inseminasi buatan pada saat berkunjung. Sebagaimana ungkapan hasil wawancara dari petugas inseminasi sebagai berikut:

“Sebagai petugas peternakan di tingkat Kecamatan tentu kami yang bertugas mensosialisasikan kepada peternak terkait program pelayanan inseminasi buatan yang lebih dikenal dengan pelan itu bagus. Melalui koordinasi dengan pemerintah kecamatan serta desa maupun kelurahan terkait jadwal pelayanan tim sehingga para masyarakat yang berprofesi sebagai peternak dapat mempersiapkan diri dalam menerima kunjungan tim.” (Wawancara dengan SA 16/12/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat peternak tentang pelayanan inseminasi buatan dilakukan oleh petugas peternakan dan kesehatan hewan pada tingkat kecamatan yang juga mempunyai fungsi koordinasi dengan pemerintah setempat.

Komunikasi merupakan sebuah proses dimana sebuah interaksi antara komunikan dan komunikator yang melakukan pertukaran pesan



didalamnya yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung, komunikasi sendiri bisa dikatakan merupakan hal yang paling krusial dalam kehidupan ini.

Melalui pendekatan pemerintah dan tim pelayanan inseminasi buatan masyarakat yang berprofesi sebagai peternak sapi dapat memahami dengan baik terkait pola peningkatan hasil produktivitas ternak. Para peternak sangat antusias dalam mendaftarkan diri agar mendapatkan pelayanan yang dinamai pelan itu bagus. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan salah satu peternak yang mengatakan bahwa:

“Awalnya ini program sebenarnya tidak ditau bagaimana pelaksanaannya. Kami kira hanya semacam pemberian obat saja untuk sapi. Tapi setelah dicerita orang pemerintah kami jadi tau dan didukung sekali ini program sama orang-orang sini karena memang bagus, kan selama ini susah memang melahirkan itu sapi”  
(Wawancara dengan SM 17/12/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang berprofesi sebagai peternak antusias dalam menerima program pelan itu bagus guna meningkatkan hasil produktivitas ternak sapi mereka. Program tersebut merupakan solusi dari permasalahan yang selama ini di alami oleh peternak sapi.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan penggerak jalannya sebuah organisasi. Begitu juga dalam sebuah bisnis ataupun perusahaan, maju mundurnya sebuah institusi pemerintah ditentukan oleh besaran sumber daya manusianya. Sehingga sumber daya manusia atau pegawai dalam organisasi



pemerintahan menjadi perhatian penting dalam usaha mencapai tujuan pemerintah.

Program pelayanan pelan itu bagus dalam meningkatkan hasil produksi peternakan sapi di Kabupaten Pinrang telah menyebar keseluruh wilayah di daerah tersebut. Sehingga tim pelayanan inseminasi yang dibentuk pemerintah menjadi tidak maksimal dalam memberikan pelayanan akibat kurangnya tim pelayanan. Berikut hasil wawancara dengan Kasi Penyuluh Peternakan yang mengatakan bahwa:

“Sejauh ini sudah ada empat tim yang terbentuk dalam memberikan pelayanan inseminasi buatan kepada masyarakat. Kurangnya tenaga teknis yang handal menjadikan proses pemberian pelayanan terhadap peternak menjadi tidak efektif dan efisien sesuai dengan target yang di bangun oleh pemerintah. Hal tersebut membuat kami kembali ingin menambah tim pelayanan inseminasi buatan, untuk sekarang ini kita membagi kelompok yang ada dengan menyusun agenda dengan sebaik-baiknya agar masyarakat benar-benar merasakan pelayanan dari pemerintah.” (Wawancara dengan MR 15/12/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan kekurangan jumlah tenaga teknis dalam melakukan pelayanan inseminasi buatan terhadap kelompok peternak sapi menjadikan pemerintah berencana menambah tim pelayanan sehingga dapat melayani semua kebutuhan peternak sapi.

Terkait Inovasi Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi (PELAN ITU BAGUS), pelaksanaannya berfokus pada penciptaan sumber daya manusia dengan melakukan tahapan sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Pembina dan evaluasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan (IB) dan Gangguan Reproduksi Sapi tingkat kabupaten, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang
  - b. Sekretaris Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang
  - c. Kepala Bidang Pengembangan Produksi dan Agribisnis Peternakan
  - d. Kepala Bidang Kesehatan hewan dan Masyarakat Veteriner
  - e. Kepala Seksi Budidaya dan Reproduksi Ternak
  - f. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak
  - g. Staf yang menangani pelaporan
2. Pembentukan Tim pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi yang terdiri dari :
  - a. Dokter Hewan
  - b. Asisten Teknis Reproduksi (ATR)
  - c. Pemeriksa Kebuntingan (PKB)
  - d. Petugas Inseminator
  - e. Petugas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan (PPKH)

Kinerja karyawan merupakan salah satu perbandingan antara input dan output rasio hasil yang diperoleh terhadap sumber daya. Karyawan

merupakan faktor utama untuk kemajuan perusahaan secara keseluruhan dengan memotivasi karyawan dapat menimbulkan komitmen organisasional untuk karyawan bekerja secara maksimal dan menghasilkan pelayanan terbaik sehingga tujuan utama perusahaan dapat tercapai.

Salah satu permasalahan yang dialami oleh petugas pelayanan inseminasi buatan adalah kekurangan saran dalam melakukan proses inseminasi. Terlebih untuk beberapa kebutuhan tertentu perlu di koordinasikan kepada pemerintah pusat karena ketersediaan barang yang sedikit di daerah. Adapun hasil wawancara dengan Asisten Teknis Reproduksi mengenai kendala petugas pelayanan inseminasi buatan yaitu:

“Kalau kebanyakan yang menjadi kendala kami di lapangan adalah kehabisan bahan guna melakukan proses inseminasi buatan, karena kebutuhan masyarakat untuk dilayani juga terus meningkat. Terlebih ada beberapa bahan seperti semen beku itu ketersediaannya hanya berada di kementerian Pertanian, sehingga memerlukan koordinasi terlebih dahulu. Adapun strategi yang kami lakukan adalah mengelompokkan ternak yang membutuhkan proses inseminasi buatan kemudian dilaporkan agar seluruh alat dalam proses inseminasi dapat terlengkapi.” (Wawancara dengan AB 15/12/2020).

Sejalan dengan hasil wawancara tersebut salah satu petugas inseminasi juga mengatakan ketersediaan semen beku menjadi penghambat proses inseminasi buatan:

“Ketersediaan semen beku yang merupakan bahan utama dalam pelaksanaan program inseminasi buatan terhadap sapi kadang menjadi penghambat terlaksananya proses inseminasi. Karena pemberian semen beku itu bertahap dan setiap daerah mempunyai jatah masing-masing. Untuk itu kami membangun sebuah metode agar kebutuhan semen beku dapat diminimalisir melalui masa pengecekan sapi itu sendiri termasuk memeriksa kesehatan ternak sapi masyarakat.” (Wawancara dengan SA 16/12/2020)



Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa beberapa kebutuhan peralatan dalam proses inseminasi yang tidak terlengkapi dengan baik menjadi proses pelayanan inseminasi buatan kadang menjadi terhambat. Hal tersebut memaksa petugas inseminasi buatan yang berada dilapang membangun strategi agar dapat meminimalisir kendala yang dapat memicu masalah.

Pemerintah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas SDM dengan biaya terjangkau dilakukan pemerintah daerah dengan perbaikan secara terus-menerus baik dalam bidang administrasi dan pelayanan sehingga kinerja pegawai pemerintah dapat maksimal.

Ketersediaan petugas peternakan dan kesehatan hewan di setiap Kecamatan memudahkan masyarakat yang berprofesi sebagai peternak sapi mengkonsultasikan permasalahan yang dialami oleh peternak kepada petugas tersebut. Kehadiran PPKH tersebut menjadikan pelayanan inseminasi buatan dapat berjalan maksimal. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Petugas Inseminasi yang mengatakan bahwa:

“Kami bertugas dalam memberikan pelayanan, menjawab keluhan dari para peternak terkait permasalahan yang mereka alami dalam pengembangan ternak sapi. Di setiap kecamatan di Kabupaten Pinrang semua ada PPKHnya dengan demikian program pelan itu bagus melalui pelayanan inseminasi buatan dapat berjalan maksimal sesuai dengan tujuan program di bentuk. Dalam meningkatkan kinerja kami tentu berlandaskan dengan standar operasional kerja dengan membuat program-program guna memastikan produktivitas peternakan sapi di setiap wilayah berjalan dengan baik. Melalui bimbingan teknis yang dilakukan oleh baik pihak kementerian atau dinas peternakan di Kabupaten Pinrang itu sendiri.” (Wawancara dengan NG 16/12/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa petugas peternakan dan kesehatan hewan yang terbentuk di setiap kecamatan di Kabupaten Pinrang telah mendapat pengarahan dari kementerian dan dinas terkait sehingga dalam melaksanakan program yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas peternakan sapi dapat berjalan maksimal sesuai dengan kebutuhan dari target atau sasaran.

Salah satu faktor untuk menciptakan kinerja yang maksimal adalah komitmen yang diciptakan oleh semua komponen-komponen individual dalam menjalankan operasional organisasi. Komitmen tersebut dapat tercipta apabila individu dalam organisasi sadar akan hak dan kewajibannya dalam organisasi tanpa melihat jabatan dan kedudukan masing-masing individu, karena pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil kerja semua anggota organisasi yang bersifat kolektif.

Dalam menerima pelayanan inseminasi buatan masyarakat yang berprofesi sebagai peternak sapi merasa cukup terlayani dengan baik dengan kapasitas tim pelayanan inseminasi buatan yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait proses manajemen peternakan sapi yang baik sehingga dapat meningkatkan produktivitas hasil peternakan sapi dari para peternak yang ada. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Peternak yang mengatakan bahwa:

“Jadi itu petugas yang datang, memberi tahu kami masyarakat disini tentang inseminasi. Memberi tahu semua alasan sapi terlambat hamil. Dari situ bahasanya masuk akal juga jadi kami masyarakat terima saja, namanya bantuan” (Wawancara dengan SF 17/12/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan pelayanan inseminasi buatan oleh petugas pelayanan memberikan pemahaman baru kepada peternak terkait bentuk penanganan peternakan sapi sehingga memberikan hasil produksi yang memuaskan kepada peternak.

### 3. Disposisi

Pada dasarnya implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya.

Sikap aparatur yang benar-benar membangun komitmen dalam upaya peningkatan hasil produksi dari peternakan sapi di Kabupaten Pinrang di lihat dari menurunnya kasus penyakit gangguan reproduksi dari peternakan sapi, hal tersebut tidak terlepas dari keseriusan pemerintah dalam melaksanakan program pelan itu bagus. Berikut hasil wawancara dengan Kasi Budidaya dan Reproduksi Peternakan mengenai Inovasi pelan itu bagus yang mengatakan bahwa:

“Inovasi pelan itu bagus merupakan salah satu top inovasi di Kabupaten Pinrang sehingga benar-benar dalam pelaksanaannya aparatur harus komitmen terhadap tanggung jawab. Salah satu contoh yang bisa kami paparkan adalah menurunnya kasus gangguan reproduksi sapi setiap tahunnya di Kabupaten Pinrang ini tahun-tahun awal program ini di buat terdapat 375 kasus laporan dari tim kami yang menyatakan sapi mengalami gangguan reproduksi. Tetapi kemudian sampai sekarang ini sudah tidak di temukan lagi penyakit demikian karena upaya sosialisasi yang benar-benar gencar di lakukan oleh aparatur pelaksana sesuai dengan tupoksinya masing-masing.” (Wawancara dengan KH 15/12/2020).



Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan terjadinya angka penurunan kasus gangguan reproduksi sapi adalah bentuk komitmen dan kerja keras dari implementor dalam menjalankan program sesuai dengan visi tujuan yang telah ditetapkan di awal.

Konsistensi perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Setiap penentuan langkah strategis dan membuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan inseminasi buatan, tim pelayanan yang terdiri dari berbagai profesi melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan terkait langkah-langkah yang di ambil agar pelaksanaan pelayanan pelan itu bagus dapat berjalan secara maksimal. Penjelasan tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Petugas Pemeriksa Kebuntingan yang mengatakan bahwa:

“Tentu sebagai sebuah tim dalam menjalankan kegiatan atau pembentukan langkah-langkah strategis dalam melakukan pelayanan inseminasi buatan kepada peternak sikap yang kami ambil adalah melakukan rapat dengan melibatkan seluruh tim, hal ini untuk pembagian tugas masing-masing dalam pelaksanaan pelayanan di lapangan sehingga kerja-kerja yang dilakukan dapat selesai dengan tepat waktu dan terstruktur sesuai dengan standar operasional kerja.” (Wawancara dengan MH 15/12/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan dalam rangka mengambil keputusan terkait pelayanan inseminasi buatan terhadap ternak sapi, tim pelaksana pelayanan dilapangan selalu melakukan musyawarah

agar mampu menetapkan langkah yang terstruktur dalam memberikan pelayanan kepada peternak sapi.

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

Kesediaan petugas peternakan dan kesehatan hewan di tingkat kecamatan dalam menjawab seluruh keluhan dari peternak sapi merupakan langkah kongkrit keseriusan pemerintah dalam menjalankan program peningkatan produktivitas sapi di Kabupaten Pinrang. Setelah proses inseminasi buatan dilakukan aparatur pelaksana tetap melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kelompok peternak yang telah mendapatkan pelayanan. Berikut hasil wawancara dengan Petugas Inseminasi mengenai monitoring kelompok peternak yang mendapatkan:

“Setelah dilakukan proses inseminasi buatan terhadap kelompok peternak sapi yang itu tidak serta merta langsung ditinggalkan tetapi tetap kami lakukan evaluasi dan monitoring apakah para peternak sudah melakukan prosedur yang telah di sosialisasikan oleh tim sebelumnya. Selain itu pihak kami tetap menjawab masukan dan keluhan dari para peternak hal ini sangat penting karena antusias masyarakat merupakan modal utama keberhasilan program ini dilaksanakan.” (Wawancara dengan SA 16/12/2020).

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan keseriusan para aparatur pelaksana dalam memberikan arahan dan masukan kepada peternak sapi merupakan sebuah sikap komitmen dalam proses pemberian pelayanan peningkatan produktivitas peternakan sapi di Kabupaten Pinrang.

Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (saran dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Bagi masyarakat peternak sapi sikap komitmen dari pemerintah dalam memberikan pelayanan inseminasi buatan terlihat dari bentuk kerja-kerja yang terstruktur mulai dari proses pengenalan program, proses inseminasi, proses pemeriksaan kesehatan reproduksi sampai kepada pengecekan kebuntingan semua dilakukan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pernyataan tersebut didukung hasil wawancara dengan peternak yang mengatakan bahwa:

“Kalau ini programnya sebenarnya sudah bagus sekali, karena kami diajarkan bagaimana cara rawat sapi betina supaya tidak kena penyakit dan bisa hamil” (Wawancara dengan LK tanggal 17/12/2020).

Salah satu masyarakat juga memberikan komentar yang sama terkait kepuasan pelayanan pemerintah dalam bidang peternakan sapi:

“Bagus caranya mengecek sapi, dijadwalkan memang jadi itu sapinya masyarakat sehat-sehat semua dilihat.” (Wawancara dengan HK tanggal 17/12/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan dalam meningkatkan produktivitas sapi telah berjalan efektif dengan melihat sikap aparaturnya pelaksana yang benar-benar berkomitmen dalam mengembangkan kegiatan peternakan masyarakat.



#### 4. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan-tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

Pelaksanaan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi di Kabupaten Pinrang dilaksanakan berdasarkan standar operasional kerja sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan provinsi, sehingga dalam pelaksanaannya dilapangan akan mudah di pahami baik oleh tim inseminator yang sudah memiliki tugas dan fungsi yang jelas dalam pelaksanaannya. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Kasi Penyuluh Peternakan yang mengatakan bahwa:

“Secara struktural pelaksanaan program pelan itu bagus berjalan dengan standar kerja yang sudah menjadi ketentuan dari pemerintah pusat dan provinsi, kami di Kabupaten Pinrang tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan pelaksana dilapangan, setiap tim pelayanan inseminasi telah mempunyai tugas masing-masing sehingga jika ada kendala dalam pelaksanaan masing-masing pihak yang berwenang dapat untuk dikonfirmasi.” (Wawancara dengan MR 15/12/2020).

Senada dengan hasil wawancara tersebut kasi budidaya dan reproduksi peternakan juga memberikan komentar yang sama:

“Sebagai pejabat publik tentu kami harus bertanggung jawab dengan tugas yang di emban termasuk pada sektor peternakan sapi. Pemerintah tentu harus mampu mengambil sikap dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat termasuk sektor peternakan sapi itu sendiri. Melalui program inseminasi buatan ini kami mengharapkan para peternak dapat benar-benar menjalankan arahan dari petugas lapangan dan pihak pemerintah akan terus melakukan pengawalan program sebagai bentuk tanggung jawab dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peternakan sapi.” (Wawancara dengan KH 15/12/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi tim pelaksana pelayanan berjalan sesuai dengan standar operasional kerja yang telah di tetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan program tersebut.

Birokrasi dicirikan oleh tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai lewat spesialisasi, aturan dan pengaturan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan dalam divisi fungsional, wewenang terpusat, rentang, kendali yang sempit dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando.

Tim pelayanan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi bekerja dengan terlebih dahulu melakukan pendataan dan pemetaan terhadap kelompok peternak dan jumlah populasi sapi sehingga memudahkan tim inseminator dalam menentukan waktu pelayanan. Masing-masing tim yang terbentuk mempunyai tugas dan wewenang masing-masing sehingga memudahkan dalam pelaksanaan program. Seperti yang diungkapkan oleh Asisten Teknis Reproduksi mengenai tim pelayanan inseminasi yang mengatakan bahwa:

“Sebagai sebuah tim tentu setiap orang yang berada dalam kelompok sudah mempunyai tugas mereka masing-masing, ada yang berfungsi

melakukan pendataan, ada sebagai petugas inseminasi, memeriksa kesehatan reproduksi sapi sampai pengecekan kebuntingan bagi ternak sapi. Pelaksanaan program yang terstruktur dengan baik akan memudahkan kami dalam memberikan pelayanan inseminasi kepada masyarakat peternak.” (Wawancara dengan AB 15/12/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan pelaksanaan pelayanan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi disusun berdasarkan struktur yang telah di buat sehingga proses pelaksanaan sangat mudah untuk di pahami dan tidak tumpang tindih.

Kekuatan utama dari birokrasi terletak dalam kemampuannya menjalankan kegiatan terbakukan secara efisien. Spesialisasi yang sama dikelompokkan dalam KementerianKementerian fungsional menghasilkan ekonomi skala, duplikasi minim dari personalia dan peralatan, dan karyawan mempunyai kesempatan untuk berbicara dalam bahasa yang sama di antara rekan kerja mereka. Pada birokrasi memungkinkan dipusatkannya pengambilan keputusan.

Secara struktural dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang sebagai pemangku kebijakan berfungsi sebagai pelindung melalui aturan-aturan yang memberikan perlindungan bagi kegiatan pelaksanaan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi dilapangan. Sementara itu petugas peternakan dan kesehatan hewan melakukan sosialisasi pelayanan kepada masyarakat dan pendataan terhadap kelompok-kelompok peternak yang akan dilayani inseminasi buatan. Pernyataan tersebut didukung hasil wawancara dengan petugas inseminasi yang mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi tugas kami sebagai pemberi sosialisasi kepada masyarakat yang



berprofesi sebagai peternak sapi terkait waktu pelayanan dan juga mapping dan pendataan jumlah peternak sapi dan populasi sapi di setiap kecamatan yang ada, kemudian alur pelaksanaan kegiatan di lapangan menjadi wewenang penuh dari tim pelayanan inseminasi buatan tanpa ada campur tangan dari pihak-pihak yang lain. Adapun permasalahan yang di dapat dilapangan tetap akan di koordinasikan dengan pemerintah terkait juga tokoh-tokoh masyarakat. Dengan demikian tahap pelaksanaan pelayanan inseminasi buatan dapat berjalan terstruktur dan sangat mudah untuk di pahami." (Wawancara dengan NG 16/12/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan tahapan pelaksanaan pelayanan inseminasi buatan telah di sosialisasikan kepada masyarakat melalui petugas PPKH dengan demikian alur pelayanan inseminasi buatan dapat di pahami oleh para peternak.

Struktur organisasi mencakup aspek-aspek diantaranya: struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan lain sebagainya. Karena struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi.

Sebagai penerima pelayanan inseminasi buatan para peternak benar-benar memahami seluruh proses tahapan pelaksanaan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi dalam meningkatkan produktivitas peternak sapi di Kabupaten Pinrang, melalui informasi yang didapatkan pada saat sosialisasi dan pelaksanaan pelayanan dilapangan. Berikut hasil wawancara dengan peternak yang mengatakan bahwa:

"Mereka banyak timnya, ada yang periksa penyakitnya hewan, ada juga yang suntik, dan ada tanda yang dikasih kalau ini sapi sudah diperiksa." (Wawancara dengan HK 17/12/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa peternak sangat memahami alur dan tugas dari masing-masing tim pelayanan inseminasi buatan, hal tersebut menjadi acuan bahwa pembentukan struktur tim berjalan sesuai dengan kebutuhan pelayanan inseminasi dan gangguan reproduksi yang dapat menjawab permasalahan masyarakat.

### C. Pembahasan Penelitian

Pada umumnya peternakan di Pinrang masih tradisional. Hewan ternak dilepas begitu saja, dan peternakan sapi sebagai usaha sambilan (*second income*). Dalam kondisi tersebut, sapi betina induk hanya mampu beranak 2-3 ekor dalam 5 tahun. Pinrang termasuk wilayah sentra pengembangan sapi di Provinsi Sulawesi Selatan. Meski demikian perkembangan populasi ternak sapi di daerah ini masih dirasakan belum maksimal, sementara letak geografis dan sumberdaya alam Kabupaten Pinrang berpotensi dalam pengembangan usaha ternak sapi.

Melalui Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang di tahun 2015 membangun inovasi yang dinamakan Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi (Pelan Itu Bagus). Hal ini cukup unik, karena pelayanan dilakukan 21 hari berturut-turut dalam satu kelompok ternak. Hal itu disesuaikan dengan 21 hari siklus birahi sapi, sebagai syarat utama dalam keberhasilan pelaksanaan inseminasi buatan. pelayanan 21 hari secara terus menerus, maka sapi induk yang tidak bunting secara keseluruhan dapat terinseminasi. Begitu pula dengan sapi induk yang terindikasi mengalami gangguan reproduksi dapat disembuhkan dengan

pengobatan yang intensif, untuk selanjutnya dilakukan inseminasi setelah injeksi hormon perangsang birahi.

Unutk itu penulis tertarik melihat bentuk Implementasi Program Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi ternak sapi dalam meningkatkan produksi peternakan sapi di kabupaten Pinrang dengan menggunakan empat indikator yang akan di bahas sebagai berikut:

1. Komunikasi

Bentuk komunikasi pada Implementasi Program Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi dalam meningkatkan produksi peternakan sapi di kabupaten pinrang dengan melakukan sosialisasi kepada kelompok sasaran yaitu peternak sapi tentang manajemen peternakan sapi yang baik dan benar sehingga sapi dapat berproduksi dengan baik. Selain itu dibentuk kelompok tim pelayanan inseminasi buatan yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam memberikan pelayanan inseminasi buatan kepada masyarakat yang berprofesi sebagai peternak sapi.

Komunikasi merupakan pesan antar manusia (*human communication*) yang terjadi dalam konteks organisasi pemerintahan. Karena itu komunikasi pemerintahan tidak lepas dari konteks komunikasi organisasi dan juga merupakan bagian dari komunikasi organisasi. Melalui komunikasi pemerintahan, birokrat pemerintah berbagi informasi, gagasan atau perasaan, dan sikap dengan partisipan komunikasi lainnya yang disebut



komunikasikan, yaitu aparat pemerintah untuk internal organisasi dan dunia usaha, masyarakat dan organisasi- organisasi non-pemerintah untuk eksternal organisasi, dan sebaliknya Mulyana (2014).

Berdasarkan teori Edward dalam Subarsono (2011) Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh seorang implementor, seorang implementor diwajibkan mengetahui target fokus dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, mengetahui apa yang harus di kerjakan, sehingga mampu mengurangi bentuk penyimpangan dalam implementasi kebijakan.

Dari pola komunikasi yang di bentuk oleh pemerintah dengan membentuk dokter hewan, asisten teknis reproduksi, pemeriksa kebuntingan, dan inseminator dapat meningkatkan produktivitas sapi di Kabupaten Pinrang sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 4. 2 Keberhasilan Program Pelan Itu Bagus dalam meningkatkan Populasi Ternak Sapi

Tahun	Peningkatan Populasi	Peningkatan
2015	24.313 ekor	2015-2016= 2.292
2016	26.605 ekor	2016-2017= 188
2017	26.793 ekor	2017-2018= 1.841
2018	28.634 ekor	

(Sumber: Dinas Peternakan dan Pertanian Kabupaten Pinrang)

Sehingga penulis menganalisa bahwa indikator komunikasi dalam merubah pola peternakan yang dilakukan masyarakat melalui program inseminasi buatan dan gangguan reproduksi berhasil dalam meningkatkan produktivitas masyarakat. Dari observasi dilapangan juga menunjukkan

masyarakat yang berprofesi sebagai peternak telah memahami model pemeliharaan sapi dari hasil sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan senantiasa menjaga pakan ternak agar tidak terjadi penyakit pada sapi yang mengakibatkan gangguan reproduksi.

## 2. Sumber Daya

Pembentukan struktur sumber daya pada Implementasi Program Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi dalam meningkatkan produksi peternakan sapi di kabupaten pinrang dapat dilihat bahwa kebutuhan pelayanan inseminasi buatan dari peternak sapi yang semakin meningkat tidak di dukung dengan ketersediaan kelompok pemberi pelayanan inseminasi buatan yang hanya berjumlah empat kelompok. Beberapa peralatan yang dibutuhkan juga terlebih dahulu harus di koordinasikan dengan pemerintah pusat. Sementara itu dalam memperhatikan kualitas pelayanan dalam menjalankan fungsinya para petugas lapangan telah di berikan bimbingan tekhnis dengan demikian peningkatan hasil produksi dari peternakan sapi dapat berjalan dengan baik.

Sumber Daya diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan tertentu, atau meloloskan diri dari kesukaran sehingga perkataan sumber daya tidak menunjukkan suatu benda, tetapi dapat berperan dalam suatu proses atau operasi yakni suatu fungsi operasional untuk mencapai tujuan tertentu seperti memenuhi kepuasan. Dengan kata lain sumber daya manusia

merupakan suatu abstraksi yang mencerminkan aspirasi manusia dan berhubungan dengan suatu fungsi atau operasi Santoso (2018).

Sementara itu dari teori Edward dalam Subarsono (2011) sumber daya dapat dilihat jika implementor mengalami kekurangan sumber daya walaupun isi semua kebijakan sudah disampaikan dengan jelas dan konsisten oleh implementor, maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya tersebut biasanya berwujud kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

Ditinjau dari segi sumber daya manusia yang bertugas dilapangan merupakan orang-orang yang berasal dari kualifikasi pendidikan masing-masing dan sudah diarahkan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan inseminasi. Sumber Daya Manusia yang terlibat langsung dalam pelaksanaan inovasi Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi (PELAN ITU BAGUS) adalah :

- a. 2 orang Dokter Hewan
- b. 9 orang Pemeriksa Kebuntingan (PKB)
- c. 5 orang Asisten Teknis Reproduksi (ATR)
- d. 21 orang Petugas Inseminator
- e. 12 Petugas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan (PPKH)
- f. Anggota kelompok ternak sasaran penerima manfaat
- g. Para Kepala Desa/Lurah di wilayah kelompok ternak sasaran penerima manfaat
- h. Tokoh Masyarakat



Sehingga penulis menganalisa bahwa secara keseluruhan pelaksanaan program inseminasi buatan guna meningkatkan hasil produksi sapi di Kabupaten Pinrang sudah memiliki sumber daya manusia yang berkompeten. Namun bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan inseminasi buatan yaitu semen beku kadang tidak tersedia sehingga menghambat pelaksanaan proses inseminasi bagi kelancaran reproduksi sapi.

### 3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana pada Implementasi Program Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi dalam meningkatkan produksi peternakan sapi di kabupaten Pinrang dapat dilihat dari sikap dalam mengambil keputusan yang senantiasa melalui proses musyawarah sehingga proses pelayanan inseminasi buatan dapat berjalan secara bertahap sesuai dengan fungsi dari tim pelayanan inseminasi dilapangan. Dengan menurunnya kasus penyakit reproduksi terhadap ternak sapi setiap tahunnya merupakan bukti nyata bentuk komitmen dari pemerintah daerah dalam upayanya meningkatkan hasil produksi peternakan sapi dan juga melalui peningkatan kesadaran peternak dengan antusias mendukung program pelayanan inseminasi buatan tersebut.

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan

yang telah ditetapkan lebih khusus bagi pada kepentingan warga Wulansari (2019).

Pada teori Edward dalam Subarsono (2011) disposisi merupakan karakter yang dimiliki seorang implementor seperti kejujuran, komitmen, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki sifat yang baik maka keberhasilan implementasi kebijakan pun tinggi, dan implementor mampu mengerjakan kebijakan dengan efektif seperti yang diharapkan pembuat kebijakan. Namun sebaliknya jika implementor memiliki sikap yang bersebrangan dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan tidak bisa berjalan sesuai yang diinginkan pembuat kebijakan.

Keberhasilan proses pelaksanaan program pelan itu bagus terlihat dari komitmen pemerintah sebagai pelaksana dalam menyusun strategi seperti yang dipaparkan sebagai berikut:

- a. Pertemuan dengan petugas inseminator, dokter hewan, asisten teknis reproduksi (ATR), pemeriksa kebuntingan (PKB), dan petugas peternakan dan kesehatan hewan kecamatan (PPKH). Agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah membahas tentang strategi dalam upaya pelaksanaan pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi.
- b. Mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat, pemerintah setempat dan pemangku kepentingan utama untuk mengadakan diskusi tentang masalah masalah yang berkaitan dengan inseminasi buatan (IB), gangguan reproduksi sapi dan sistem pemeliharaan

ternak. Masalah masalah tersebut dibahas bersama untuk mencari solusi yang bisa dilakukan di wilayah sentra pengembangan sapi.

- c. Membentuk tim pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi. Tim tersebut terdiri dari dokter hewan, asisten teknis reproduksi (ATR), pemeriksa kebuntingan (PKB), dan petugas peternakan dan kesehatan hewan kecamatan (PPKH).
- d. Sosialisasi kepada kelompok peternak ditingkat kecamatan dan desa tentang mekanisme pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi ternak.
- e. Inovasi Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi (PELAN TAPI BAGUS) pelaksanaannya sangat sederhana, hanya memerlukan kerjasama, kekompakan dan keterampilan petugas tim dalam melakukan pelayanan. Begitu pula dalam hal partisipasi masyarakat peternak.
- f. Dengan inovasi ini, permasalahan pemahaman masyarakat tentang inseminasi buatan (IB) dapat teratasi, optimalisasi jarak kelahiran dapat terlaksana, perkawinan sedarah dapat dihindari dan penularan penyakit gangguan reproduksi dapat ditekan.
- g. Pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah setempat dan tokoh masyarakat, serta menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan masyarakat peternak, sangat mendukung keberhasilan Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi (PELAN ITU BAGUS) yang



telah dilaksanakan dan perbaikan yang signifikan pada kualitas pelayanan yang diberikan.

- h. 21 hari pelayanan, 21 hari siklus birahi sapi, solusi tepat dan cerdas dalam meningkatkan populasi dan kualitas genetik sapi

Hasil analisa penulis terkait sikap pelaksana dalam mendorong program inseminasi buatan dan gangguan reproduksi untuk meningkatkan hasil produktivitas peternakan sapi di Kabupaten Pinrang berjalan dengan baik. Dimana pemerintah membentuk struktur kerja yang fokus dalam melaksanakan program kepada target dan sasaran yaitu para peternak sapi.

#### 4. Struktur Birokrasi

Berkaitan dengan struktur birokrasi terlaksana sesuai dengan arahan yang tertuang dalam standar operasional kerja oleh dinas peternakan dan perkebunan Kabupaten Pinrang sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang berbentuk surat keputusan sehingga tim yang terbentuk memiliki fungsinya masing-masing dalam memberikan pelayanan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sebagai langkah nyata meningkatkan produksi peternakan sapi di Kabupaten Pinrang.

Implementasi kebijakan harus dilihat dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi sesuai dengan kempuan, kapabilitas dan kompetensinya. Selain itu pengatur birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *bypassing personil* Winarno (2012).

Sesuai dengan teori Edward dalam Subarsono (2011) struktur organisasi terlalu panjang maka birokrasi akan mengalami prosedur yang rumit dan kompleks, oleh karena itu struktur organisasi sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* dan *Fragmentasi*.

Sementara itu berdasarkan petunjuk pelaksanaan Pelan Itu Bagus (Pelaksanaan IB, PKB dan pelaporan kelahiran) tentang Pembentukan Tim pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi yang berdiri dari Tahun 2018 dengan fungsi dan tugas masing-masing tim inseminasi buatan sebagai berikut:

- a) Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medie veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
- b) Asisten Teknis Reproduksi yang selanjutnya disebut ATR adalah petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan keterampilan dasar manajemen reproduksi serta memiliki SIM-A3 dan/atau Surat Tugas.
- c) Pemeriksa Kebuntingan (PKB) adalah yang selanjutnya disebut Petugas PKb adalah petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan keterampilan khusus untuk melaksanakan IB dan PKB serta telah memiliki SIM-A2 dan/atau Surat Tugas.

d) Petugas Inseminator adalah yang telah dididik dan lulus dalam latihan keterampilan khusus untuk melakukan IB serta telah memiliki SIM-I dan/atau Surat Tugas.

e) Petugas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan (PPKH) adalah petugas lapangan yang direkomendasikan dari dinas pertanian dan peternakan Kabupaten Pinrang untuk melakukan pendataan terhadap ternak yang mengalami masalah reproduksi.

Hasil analisa penulis struktur kerja pelaksanaan program inseminasi buatan telah disusun berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing serta melibatkan tenaga profesional. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Program pelayanan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi di Kabupaten Pinrang yang diberi nama Pelan Jitu Bagus merupakan terobosan dalam meningkatkan hasil produksi peternakan sapi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Program Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi perilaku level bawah membutuhkan berbagai masukan secara aktualisasi dari dinas perkebunan dan peternakan Kabupaten Pinrang dalam mengkoordinasikan program ini sebagai program yang harus teraktualisasikan pada level bawah. Melalui koordinasi yang dilakukan oleh pihak penyuluh di bidang peternakan dapat meningkatkan hasil peternakan.
2. Sumber daya, ketersediaan sarana dan prasarana peternakan mendukung proses inventarisasi, identifikasi pengembangan dan pembinaan teknis sehingga program peningkatan populasi ternak dan penurunan prevalence penyakit gangguan reproduksi pada ternak sapi di Kabupaten Pinrang mengalami peningkatan.
3. Disposisi sikap dari aparatur yang bertugas di lapangan antara petugas kebuntingan dan petugas inseminasi buatan dengan benar-benar

bekerja sesuai dengan juklak Pelan Itu Bagus dapat meningkatkan populasi ternak sapi di Kabupaten Pinrang.

4. Struktur Birokrasi melalui kerjasama antar organisasi dan mengembangkan berbagai kepentingan antar organisasi dapat mewujudkan terlaksananya inseminasi buatan pada peternakan sapi yang dapat mengurangi masalah reproduksi sapi di Kabupaten Pinrang.

## **B. Saran**

1. Perlu meningkatkan pemberian sosialisasi dan bimbingan terhadap masyarakat yang berprofesi sebagai peternak terkait manajemen pemeliharaan sapi yang benar.
2. Perlu penambahan operasional bagi tim pelayanan inseminasi buatan sesuai dengan kinerja dalam upayanya meningkatkan hasil produksi sapi di Kabupaten Pinrang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjid, D. A. (2012). Membangun Industri Peternakan Berkelanjutan. *Jurnal Ekstensia*. Volume 7(5), 25-28.
- Akib, H. (2016). Implementasi kebijakan program Makassar tidak rantasa (mtr) di kota Makassar. *Jurnal ilmiah ilmu administrasi public*. Volume 6(2), 21-34.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dunn, W. N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dodi. (2010). *Beternak dan Bisnis Sapi Potong*. Jakarta: PT Agro Media Pustaka.
- Harsono, H. (2002). *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kapioru, H. E. (2014). Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, *Jurnal Nominal*. Volume 3(1). 110-119.
- Majid, A dan Rochiman, C. (2014). *Pendekatan Ilmiah dalam Implementasi Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Munir, S. (2013). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Purwanto, A. E dan Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rahmawati, N. (2012). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengurangi Angka Pengangguran, Skripsi. UIN Sunan Ampel
- Ramdhani, A dan Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*. Volume 11(01), 1-12.
- Rusdiana, & Talib, (2019). Kebijakan Pemerintah Mendukung Peningkatan Usaha Sapi Potong di Peternak. SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 13(3), 380-395.
- Rusidiana. (2011). *Analisis Ekonomi Penggemukan Sapi Perah Berbasis Tanaman Ubi Kayu Di Pedesaan*. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Peternakan. Bogor.



- Safitri, T. (2011). *Penerapan Good Breeding Practices Sapi Potong di PT Lembu Jantan Perkasa Serang Banten*. Skripsi. Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Situmeang, D. F. (2012). *Implementasi kebijakan pemerintah Kota Medan Dalam mengelola pedagang kaki lima (studi kasus pada pedagang kaki lima di depan Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan)*. USU Medan, Sumatera Utara.
- Sudardjat, S. (2000). Potensi dan Prospek Bahan Pakan Lokal dalam Mengembangkan Industri Peternakan di Indonesia. *Jurnal Buletin Peternakan*, Volume 8(3), 11-15.
- Subarsono, A. G. (2011). *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Taufik, M. dan Isril. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 4(2), 135-140.
- Wahab, A. S. (2002). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2011). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yasin, S. (2013). *Produksi Ternak Ruminansia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Yusdja. (2004). *Pasar Sapi di Indonesia, Kebijakan dan Strategi dalam Percepatan Pencapaian Swasembada Daging*. Jakarta : Bappenas.

Dokumen :

Peraturan Bupati No.46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Betina Bunting.

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 656/Kpts/OT.050/10/2016 tentang Kelompok Kerja Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang No.41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan



### LAMPIRAN

Lampiran

Gambar 5. 1

Surat Izin Penelitian PTSP Kabupaten Pinrang

**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jendral Sudirman Nomor 40, Telok (T) 04211921895 Pinrang 51212

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 54/2021/PENELITIAN/UM/PTSP/11/2021

Tentang  
**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Mengingat** bahwa berdasarkan Surat Izin berkehadapan umum diterima tanggal 19-11-2021 oleh nama A. NURPADILAH MAKHUL sebagai salah seorang peserta yang dapat dan mampu dapat diberikan Rekomendasi Penelitian

**Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1998,  
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002,  
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007,  
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,  
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014,  
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014,  
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016, dan  
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 34 Tahun 2019

**Mempertimbangkan** 1. Rekomendasi Tim Teknik PTSP (TSP/RT) Kabupaten Pinrang (TSP/RT/11/2021), Tanggal : 20-11-2021  
 2. Surat Izin Penemuan (SIP) Nomor : KABUPATEN PINRANG/UM/PTSP/11/2021, Tanggal : 20-11-2021

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**  
**KESATU:** Mendirikan Rekomendasi Penelitian kepada

1. Nama Lembaga	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2. Nama Lembaga	Dr. SULTAN ALAUDDIN No. 255 MAKASSAR
3. Nama Peneliti	MUBADILAH MAKHUL
4. Jenis Penelitian	INFORMASI PROGRAM PENGEMBANGAN TERBUK SATU PINTU PADU ZONAS PERTANIAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN PINRANG
5. Jumlah Waktu Penelitian	2 Bulan
6. Sasaran/Target Penelitian	DAKAS PETA ZONAS PERTANIAN DAN PERKOTAAN SAKIT PETERNAK SAPI
7. Lokasi Penelitian	Konominas Matirey Bala

**KEDUA** Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 20-01-2022

**KEDUA** Peserta wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan

**KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, apabila dikemudian hari terdapat kekhawatiran, dan akan diadakan perubahan selanglalu diperlukan

Ditertbitkan di Pinrang Pada Tanggal 20 November 2021



**Biaya : Rp 0,-**



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406021993112001  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh



Lampiran 2

Gambar 5. 2

Surat Izin Telah Melakukan Penelitian



Lampiran 3

Gambar 5. 3

Wawancara dengan Kasi Budidaya dan Reproduksi Peternakan



Lampiran 4

Gambar 5. 4

Wawancara dengan Kasi Penyuluhan Peternakan





Lampiran 5

Gambar 5. 5

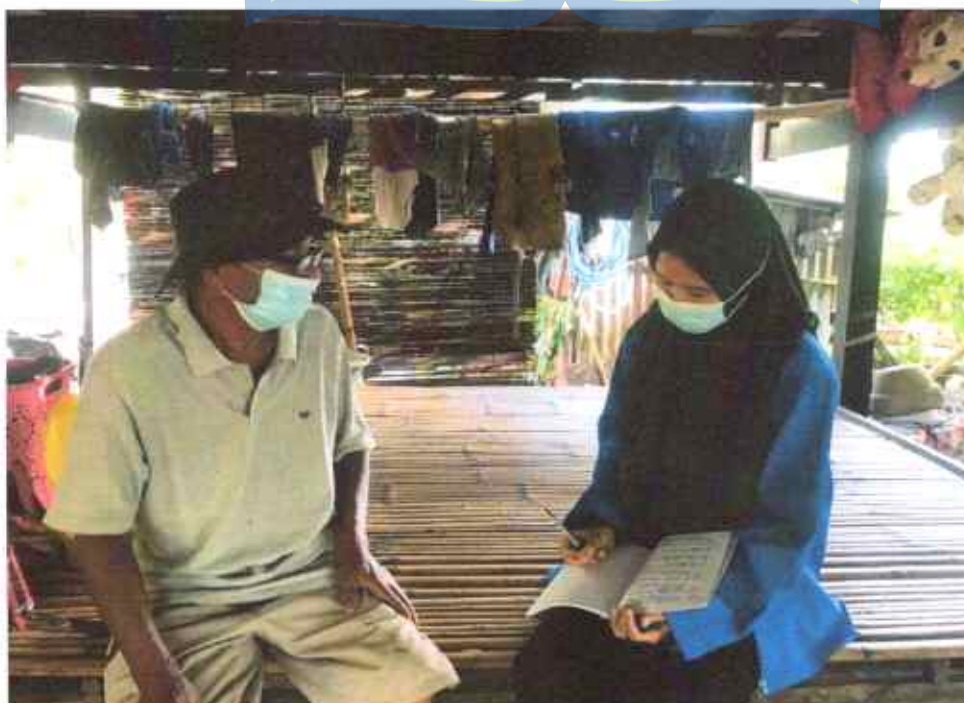
Wawancara dengan Petugas Inseminasi



Lampiran 6

Gambar 5. 6

Wawancara dengan Peternak





## RIWAYAT HIDUP



**A. Nurfadilah Makmur**, dilahirkan di kota Pare-Pare pada tanggal 03 Oktober 1998. Anak tunggal dari pasangan suami istri A. Makmur dan A. Nurdiana. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 16 Pinrang dan selesai pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Pinrang dan tamat pada tahun 2013, kemudian pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai siswa SMA Negeri 1 Pinrang dan tamat pada tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Makassar yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan nomor stambuk 1056111264 16.

Berkat petunjuk serta pertolongan dari Allah SWT, usaha dan doa kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Implementasi Program Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi Pada Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Pinrang”.